

# Komunikasi Politik dalam Perspektif Ilmu Komunikasi

Prof. Nunung Prajarto, M.A., Ph.D.



## PENDAHULUAN

---

Media massa di Indonesia kerap menyajikan ucapan petinggi pemerintah yang menegaskan perlunya melakukan komunikasi politik yang baik dengan masyarakat. Tentu saja, ucapan ini tidak ada salahnya dan diyakini dapat menghadirkan kehidupan politik yang sehat. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, hal yang disebut dengan komunikasi politik ini, kemudian dipahami dengan sudut pandang yang sempit, yang hanya menunjukkan komunikasi dari pemerintah ke masyarakat, serta mengabaikan komunikasi politik yang bisa saja terjadi dari masyarakat ke pemerintah atau bahkan antaranggota masyarakat.

Pandangan sempit yang seperti itu, kiranya perlu diluruskan karena setidaknya komunikasi politik menurut Norris (2010) adalah suatu proses interaktif yang terkait dengan transmisi informasi di antara politisi, media berita, dan publik. Dia melanjutkan, proses interaktif ini dapat ke bawah (sebagai contoh: dari lembaga yang mengatur ke warga negara), secara horizontal (misalnya, antaraktor politik), serta ke atas (umpamanya, dari opini publik ke otoritas penguasa).

Secara umum, modul ini menguraikan pengenalan tentang dasar-dasar yang nantinya akan digunakan untuk memahami komunikasi politik secara menyeluruh. Secara umum, modul pertama ini akan menyajikan peta pemahaman komunikasi politik dalam ilmu komunikasi. Secara khusus, modul ini menyajikan secara berurutan tinjauan ulang tentang ilmu komunikasi dan ilmu politik, pengertian komunikasi politik, serta landasan filosofis, teoritik, dan empirik dalam komunikasi politik. Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang dasar-dasar komunikasi politik dalam proses komunikasi.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik

Komunikasi dan politik memiliki kaitan yang erat. Hubungan ini bisa jadi terwujud dalam pernyataan, misalnya “Salah satu kegiatan politik adalah melakukan komunikasi” atau “Komunikasi dapat digunakan untuk mencapai satu tujuan politik tertentu”. Dalam kehidupan sehari-hari, orang dengan mudah menemukan sejumlah aktivitas komunikasi yang terjadi dengan latar belakang kepentingan atau tujuan politik. Sebagai contoh, seorang walikota yang memberi sambutan pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh yang lain, upaya pengenalan visi dan misi calon presiden yang salah satunya dilakukan melalui debat politik atau perbincangan di masyarakat tentang kontroversi kebijakan baru yang diberlakukan suatu pemerintah daerah.

Untuk mempermudah pemahaman tentang komunikasi politik, ada baiknya Anda menyegarkan kembali ingatan dan pemahaman Anda tentang dua bidang ilmu yang erat kaitannya dengan komunikasi politik. Kedua bidang ilmu yang perlu Anda kenali kembali ini adalah ilmu komunikasi dan ilmu politik. Menjadi suatu hal yang akan lebih ideal lagi, bila Anda dapat membaca ulang buku-buku tentang ilmu komunikasi dan ilmu politik, dan kemudian mencoba merangkaiannya. Hal seperti ini, tentunya akan dapat mencerahkan dan memperluas wawasan Anda, sebelum secara khusus mempelajari komunikasi politik. Kegiatan awal dalam mempelajari komunikasi politik akan dimulai dengan hal ini.

**A. ILMU KOMUNIKASI**

Pendekatan biografi yang disertai pengedepanan nama-nama besar beserta institusi-institusi yang berjasa tercatat paling banyak dipakai untuk memahami pertumbuhan ilmu komunikasi. Hal ini di antaranya dapat ditelusuri dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu komunikasi yang tidak akan dapat dipisahkan dari penemuan revolusioner mesin cetak oleh Johannes Gutenberg (1457) di Mainz, Jerman (Griffin, 2011). Namun, bila Anda mencermati tradisi perlawanan di Eropa, gen kelahiran ilmu komunikasi

biasanya disangkutkutan pada teori evolusi Charles Darwin (Inggris), psikoanalisis Sigmund Freud (Austria), dan *the Frankfurt school* – Karl Marx (Jerman). Aliran pemikiran ketiga intelektual abad XIX ini juga diyakini memiliki pengaruh tidak langsung, namun signifikan terhadap pertumbuhan studi ilmu komunikasi di Amerika Serikat pada abad XX (Rogers, 1994). Perujuk aliran pemikiran besar tradisi perlawanan Eropa di atas di antaranya adalah The Chicago School, The Palo Alto School, Harold D. Lasswell, dan Carl I. Hovland.

### 1. Dari Eropa ke Amerika Serikat

Pemikiran Darwin, seorang ahli biologi, memberi landasan penting bagi studi komunikasi (Rogers, 1994 dan Ekman, 1973). Disebutkan oleh Rogers (1994), bahwa Darwin membantu dikenalnya studi tentang komunikasi nonverbal. Harus diakui memang, teori evolusi Darwin kurang banyak diminati oleh para ahli komunikasi, meskipun studi komunikasi nonverbal sebagai salah satu spesialisasi ilmu komunikasi mau tidak mau harus bersentuhan dengan pemikirannya.

Pemikiran Freud, bukan ahli ilmu sosial yang berpengaruh pada ilmu komunikasi, tetapi pemikirannya di antaranya tentang faktor-faktor ketidaksadaran manusia (*unconsciousness*) terkait pula dalam suatu proses komunikasi (Griffin, 2003 dan Cohen, 1983). Di Amerika Serikat, pengikut pemikiran Freud mengembangkan ilmu komunikasi melalui studi interaksional (*interactional communication*) mengantar The Palo Alto Group pada diktum “*one cannot not communicate*” (Watzlawick, Beavin, dan Jackson, 1967), pergeseran paradigma (Griffin, 2003; dan Rogers, 1994), pemfokusan pada persoalan-persoalan komunikasi, dan adanya faktor-faktor nonverbal, *unintentional*, *paradox creating*, dan *useful* sebagai teknik terapi dalam komunikasi antarmanusia (Rogers, 1994).

Dalam penelitian komunikasi, pengikut aliran kritis ini memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dengan pengikut aliran empiris. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Karl Marx, memperdalam ilmu hukum dan filsafat, serta pengkritik keras kapitalisme yang meluas hingga menjadi pusat kajian The Frankfurt School (*critical school*). Pengikut aliran kritis, melalui pandangan makro mereka, lebih mengkritisi persoalan “siapa yang memiliki dan mengontrol media” dengan bersandar pada postulat bahwa media massa dimanfaatkan untuk mengontrol masyarakat. Sebaliknya pengikut aliran empiris lebih berfokus pada pandangan mikro tentang pengaruh media, atas

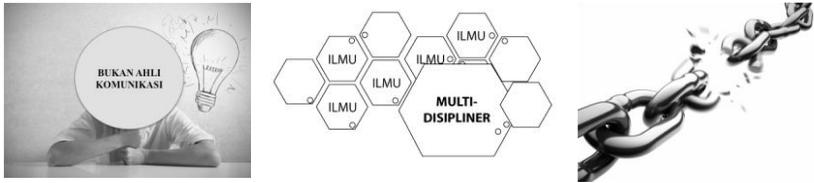
dasar pemikiran bahwa media massa mampu membenahi persoalan-persoalan sosial yang mengarah pada suatu perubahan sosial (Rogers, 1994).

Migrasi intelektual menandai migrasi tradisi keilmuan Eropa ke perkembangan teori-teori ilmu komunikasi di Amerika Serikat. Melalui tinjauannya, Rogers (1994) memasang nama Wilbur Schramm, yang berlatar belakang pendidikan sejarah, politik, dan literatur sebagai tokoh utama perkembangan ilmu komunikasi di Amerika Serikat. Beberapa nama lain yang juga disebut Rogers adalah Harold D. Lasswell (analisis propaganda), Kurt Lewin (dinamika kelompok), Paul F. Lazarsfeld (efek komunikasi massa), Carl I. Hovland (persuasi), Norbert Wiener (sibernetika), dan Claude E. Shannon (teori informasi). Selain itu, *The Chicago School* dicatat sebagai institusi berpengaruh yang mengantar pada pengakuan ilmu komunikasi.

Perkembangan ilmu komunikasi di Amerika Serikat pada waktu itu dipengaruhi oleh tiga faktor. *Pertama*, pertumbuhan ilmu komunikasi terkait dengan kebutuhan Amerika Serikat dalam merespons situasi dunia yang ada. *Kedua*, ilmu komunikasi berkembang atas dukungan ilmu-ilmu lain atau bahkan mata kajian salah satu atau beberapa bagian dari ilmu komunikasi sangat dipengaruhi oleh studi yang dilakukan oleh ilmu-ilmu lain, seperti ilmu politik, psikologi, sosiologi, dan ekonomi. *Ketiga*, penemuan-penemuan teknologi yang mengangkut transmisi pesan di dalamnya menjadi pelatuk dari hampir semua kajian ilmu komunikasi yang dominan di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, Anda setidaknya akan dapat membuat tiga catatan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ilmu komunikasi, sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ilmu komunikasi sama sekali tak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran tokoh-tokoh intelektual yang *notabene* bukan ahli komunikasi.
- b. Pengaruh pemikiran mereka yang merambah ke ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu politik, serta kemudian menjangkau ke ilmu komunikasi, menjadikan ilmu komunikasi mau tidak mau bersifat multidisipliner.
- c. Jika asal muasal studi ilmu komunikasi dikaitkan dengan *humanistic origins* dalam bentuk aktivitas retorika di abad-abad sebelum Masehi hingga pencatatan sejarah pada temuan mesin Gutenberg, serta alur induk pemikiran Darwin, Freud, dan Marx maka terlihat adanya satu rantai sejarah yang hilang, berupa dinamika studi komunikasi yang tak tercatat dan terlacak setidaknya selama hampir 1.400 tahun.

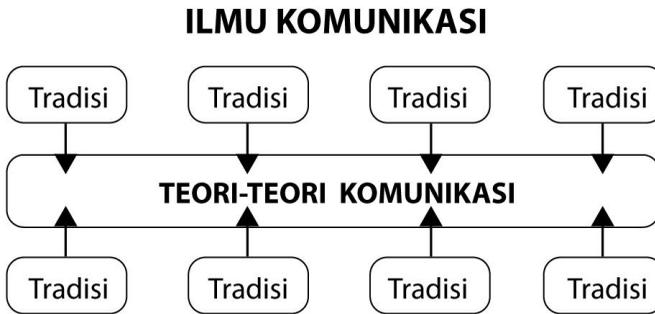


Gambar 1.1  
Perkembangan Ilmu Komunikasi

Dalam tahap lanjut, khususnya di Amerika Serikat terlihat dikotomi yang kemudian mendasari segenap kajian ilmu komunikasi, yaitu komunikasi massa dan komunikasi yang cenderung pada komunikasi interpersonal. Walaupun Reardon dan Rogers (1988) menyebut pendikotomian ini sebagai suatu *false dichotomy*, tak bisa dipungkiri kalau kajian ilmu komunikasi di kemudian hari terlihat dominannya kajian komunikasi massa daripada kajian komunikasi interpersonal (McQuails, 2000).

## 2. Delapan Tradisi Keilmuan Komunikasi

Hingga saat ini, perkembangan ilmu komunikasi yang tidak terlepas dari sejumlah teori yang dilahirkan dan diuji serta berbagai metode penelitian yang diterapkan oleh para peneliti dan ahli ilmu komunikasi, pada dasarnya menginduk pada delapan tradisi keilmuan komunikasi (Griffin, 2003). Anda dapat membayangkan kedelapan tradisi ini sebagai delapan buah bengkel kerja yang besar, yang masing-masing bengkel itu kemudian menghasilkan beberapa produk dengan berbagai serinya. Dengan pengandaian seperti ini, Anda dapat menyamakan ilmu komunikasi sebagai area industri, tradisi keilmuan ibarat bengkel kerja, serta teori dan metode penelitian ilmu komunikasi kira-kira adalah berbagai merek mobil dengan beragam serinya.



Gambar 1.2  
Ilmu, Tradisi, dan Teori Komunikasi

Kedelapan tradisi keilmuan komunikasi ini dapat Anda pahami dari uraian di bawah ini.

Tradisi *pertama*, berkaitan dengan proses komunikasi sebagai pengaruh dari suatu hubungan interpersonal. Tradisi ini dikenal dengan *the socio-psychological tradition* dan mendapat dukungan signifikan dari penelitian-penelitian Universitas Yale. Carl I. Hovland yang oleh Schramm dipandang sebagai pemasang tiang utama ilmu komunikasi dengan kajian persuasinya, sebagai contoh, menekankan adanya perbedaan antara reaksi komunikan terhadap pesan-pesan yang disampaikan sumber yang berkredibilitas tinggi dan sumber berkredibilitas rendah (Griffin, 2003).

Tradisi *kedua*, dikenal dengan *the cybernetic tradition* yang memandang komunikasi sebagai proses pentransmisian informasi. Dasar ide tradisi ini adalah model matematik penyampaian *signal* dari Shannon dan Weaver (1949), yang memandang komunikasi sebagai suatu proses yang linier. Penonjolan terhadap model Shannon dan Weaver untuk generalisasi keilmuan komunikasi ini berjalan paralel dengan pandangan Fiske (1990), yang menganggap model matematik mereka sebagai dasar perkembangan model-model komunikasi berikutnya (Gerbner, 1956; Schramm, 1960; Newcomb, 1953; dan Westley dan MacLean, 1957). Secara umum kemudian Norbert Wiener (1967), dengan konsep tentang *feedback*-nya, mencetuskan tradisi sibernetik ini, dan mengantar pada pemahaman komunikasi sebagai penghubung bagian-bagian terpisah dalam suatu sistem, termasuk untuk komunikasi sosial.

Tradisi *ketiga*, *the rhetorical tradition* menempatkan komunikasi sebagai suatu aktivitas seni yang ditujukan kepada publik dengan landasan bahwa komunikasi adalah seni berbicara kepada umum, yang tentunya terkait dengan

tradisi retorika klasik pada abad-abad sebelum Masehi yang kemudian dikembangkan dalam aktivitas propaganda dan upaya-upaya melakukan persuasi (Griffin, 2003; Trenholm, 1989; dan Larson, 1986). Tiga dasar utama yang disodorkan dalam tradisi ini adalah *logos* (logika), *ethos* (etika), dan *pathos* (emosi) yang mengantar pada keyakinan bahwa kesempurnaan komunikasi ditentukan oleh latihan dan praktik.



Gambar 1.3  
Komunikasi sebagai Seni Berbicara

Tradisi *keempat, the semiotic tradition* memandang komunikasi sebagai suatu proses pemaknaan bersama simbol-simbol komunikasi. Semiotik merupakan suatu studi tentang simbol dan kata *semiology* dipopulerkan oleh Ferdinand de Saussure (Hodge dan Kress, 1988). Kontroversi umum yang terdapat pada tradisi ini berakar dari pemaknaan kata sebagai suatu simbol. Bagi para ahli semiotik, kata tidaklah memiliki makna dan oranglah yang memberi makna pada kata itu. Dalam perkembangannya, tradisi semiotik menjembatani studi tentang bahasa, lambang-lambang nonverbal, serta gambar-gambar (Barthes, 2003 dan Griffin, 2003).

Dikembangkan ahli bahasa Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf, tradisi *kelima, the socio-cultural tradition* memaknai proses komunikasi sebagai upaya penciptaan dan pembentuk realitas sosial (Kay dan Kempton, 1984). Pemikiran mereka dilandasi hipotesis bahwa struktur bahasa suatu kebudayaan dapat mempertajam hal-hal yang dipikirkan dan dikerjakan

manusia. Pada masa sekarang, tradisi sosial kultural ini mengantar pada pemahaman bahwa melalui proses komunikasilah realitas sosial dapat dihasilkan, dipertahankan, disempurnakan, dan dialihgenerasikan (Carey, 1989 dan Fiske, 1987).

Tradisi *keenam, the critical tradition* meyakini komunikasi sebagai “*a reflective challenge of unjust discourse*” (Griffin, 2003). Tradisi komunikasi ini sangat terkait dengan upaya The Frankfurt School membedah perbedaan antara nilai-nilai kebebasan dan persamaan di dunia liberal, serta pemusatan dan pelanggaran kekuasaan yang menyebabkan nilai-nilai itu sekadar sebagai sebuah mitos. Dalam kehidupan media massa, pengikut tradisi ini menentang penggunaan media massa sebagai alat untuk mengontrol masyarakat (Habermas, 2001 dan Rogers, 1994). Namun secara umum, pendukung tradisi ini mengkritisi keadaan masyarakat sekarang dalam tiga bentuk: penguasaan bahasa untuk menciptakan ketimpangan kekuasaan, peran negatif media massa untuk keperluan represi, serta ketergantungan membuta pada metode ilmiah dan penerimaan hasil-hasil ilmiahnya (Griffin, 2003).

Tradisi *ketujuh*, mirip dengan tradisi semiotik, *the phenomenological tradition* memaknai komunikasi sebagai bertemunya pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain melalui sebuah dialog. Penekanan lebih diberikan pada pengalaman (dan *bukan* simbol), serta dialog (dan *bukan* sekadar pemaknaan bersama). Ahli psikologi Carl Rogers (1961 dan 1957) mengajukan tiga faktor untuk keberhasilan komunikasi: kongruensi, kesetaraan penghargaan, dan empati. Tradisi fenomenologis ini cenderung mengutamakan pengalaman langsung pribadi dan mengesampingkan segala bentuk referensi apapun.

Tradisi *kedelapan, the ethical tradition* memandang proses komunikasi dalam kaitannya dengan tanggung jawab etik manusia yang menginteraksikan karakter secara lugas dan menguntungkan (Griffin, 2003). Perhatian terhadap masalah etik ini mau tidak mau mengantar pada persoalan-persoalan mendasar semacam kejujuran, kebenaran, keakuratan, alasan-alasan mendasar, konsekuensi, pemahaman, dan respek dalam suatu aktivitas komunikasi.

Kedelapan tradisi keilmuan komunikasi di atas, dapat dipilahkan lagi dalam *false dichotomy*-nya Reardon dan Rogers (1988). Meskipun pendikotomian ini tidak dapat dilakukan secara tegas dan mungkin terjadi tumpang tindih, peta tradisi ini bisa memberi petunjuk arah perkembangan ilmu komunikasi. *Pertama*, tradisi sosio-psikologis, retorika, dan fenomenologis berkecenderungan pada komunikasi interpersonal. *Kedua*, tradisi sibernetik, semiotik, sosio-kultural, kritis, dan etis mengarah pada perkembangan komunikasi massa. Di antara kedua pengutuban ini,

terselenggara juga satu kutub lain yang biasa disebut sebagai komunikasi publik dan kelompok (Griffin, 2003).

Pemetaan tradisi keilmuan komunikasi di atas kiranya dapat mempermudah Anda melakukan pelacakan terhadap perkembangan teori-teori komunikasi yang muncul. Kembali harus dicatat bahwa tidak mungkin untuk menarik garis tegas antara suatu teori dan acuan pada tradisi tertentu. Kemungkinan terdekat adalah dengan mengaitkan suatu teori dengan pendikotomian (atau malah pentrikotomian) seperti yang telah disebutkan di atas.

### 3. Teori dan Model dalam Ilmu Komunikasi

Anda dapat menyegarkan ingatan Anda kembali tentang delapan tradisi keilmuan dan sejumlah teori komunikasi dengan membuka kembali modul Pengantar Ilmu Komunikasi yang pernah Anda pelajari. Hal ini akan membuat Anda merasa memiliki landasan yang kuat dalam mengulang pemahaman tentang ilmu komunikasi pada umumnya dan untuk memahami komunikasi politik pada khususnya.

Generalisasi keilmuan komunikasi menuntun pada teori-teori umum yang cukup banyak dikenal. Pelacakan lebih lanjut membawa pada pengayaan paham teori-teori komunikasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Fiske (1990) mengedepankan model matematik Shannon dan Weaver dalam memandang komunikasi sebagai suatu proses yang linier. Model-model komunikasi lainnya diungkapkan oleh Lasswell, Carroll, Schramm, Berlo, Ross, dan Sister Marie (Ross, 1965). Selain itu, dengan berdasar model Westley dan MacLean, serta McQuail (2000), menyediakan suatu kerangka bagi teori formasi tentang media dan masyarakat.
- b. Dalam komunikasi interpersonal, Judee Burgoon (2003) menyodorkan *the expectancy violations theory* dan bersama Buller mengulas *the interpersonal deception theory* (Burgoon dan Buller, 2003). Selain mereka, Altman dan Taylor (2003) mendiskusikan *the social penetration theory*, Berger (2003) dengan *the uncertainty reduction theory*, Sherif (2003) dengan *the social judgment theory*, serta Festinger (2003) dengan *the cognitive dissonance theory*-nya.
- c. Sejumlah teori lain dapat dikategorikan berperan besar dalam perkembangan komunikasi kelompok atau komunikasi publik. Di antaranya adalah *the adaptive structuration theory* (Poole, 2003), *the rhetoric theory* (Aristotle, 2003), dan *dramatism* (Burke, 2003). Tercatat,

pendekatan sistem informasi dan pendekatan budaya dalam suatu organisasi sangat memengaruhi studi komunikasi kelompok ini (Weick, 2003; Geertz dan Pacanowsky, 2003), hingga ditengarainya suatu pergeseran paradigma di dalamnya dari *rational world paradigm* ke *narrative paradigm* oleh Walter Fisher (2003).

- d. Tebaran teori komunikasi dalam kenyataannya lebih dan sangat banyak didapatkan pada komunikasi massa. Peta historis yang dikemukakan McLuhan (1967 dan 2003) dengan periodisasi tribal, abjad, mesin cetak, dan elektronik yang mengantar pada paham bahwa media adalah pesan juga, dapat disebut memberi ketegasan tentang sejumlah teori komunikasi massa. Selain itu, McQuail (2000) memberi banyak pengaruh pada perkembangan teori komunikasi massa dalam kaitannya dengan media massa, hingga ia mendapat penghormatan sebagai tokoh teori komunikasi massa (DeFleur dan Ball-Rokeach, 1989). Tak dapat dipisahkan di sini adalah teori *uses and gratification*, teori *agenda setting*, teori *cultivation*, studi-studi *cultural*, dan semiotik yang semakin memperkaya teori dalam lingkup komunikasi massa (Barthes, 2003; Hall, 2003; Gerbner, 2003; McCombs dan Shaw, 2003; dan McQuail, 1998).

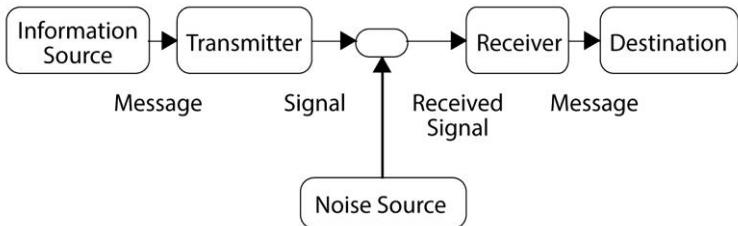
Dalam banyak hal, model dapat dipahami sebagai penyederhanaan dari suatu teori. Dengan pengertian ini, maka model-model komunikasi pada dasarnya merupakan cerminan dari teori-teori komunikasi yang ada. Sebagai cara untuk menyederhanakan pemahaman, model-model komunikasi mewakili berbagai atau rangkaian teori komunikasi yang telah dikembangkan para ahli dan peneliti dalam ilmu komunikasi. Sedangkan teori sering diartikan sebagai generalisasi yang abstrak tentang fenomena. Teori merangkum berbagai peristiwa yang kemudian diungkapkan dalam satu pernyataan yang dapat diterima kebenarannya.

Terlepas dari berbagai macam teori komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, maupun komunikasi massa, teori/model yang dikenal adalah model Lasswell, Schramm, matematik, Osgood, simetrik Newcomb, Westley-MacLean, dan Gerbner. Anda dapat mencermati dan mengulang mengingat kembali beberapa model yang dimaksud:

a. *Model Lasswell (Severin dan Tankard, 2000)*

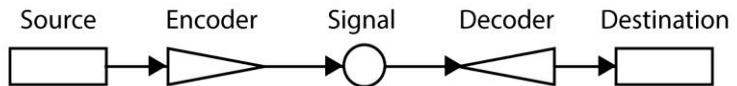
*Who  
Says What  
In Which Channel  
To Whom  
With What Effect?*

b. *Model Matematik Shannon dan Weaver (Griffin, 2003), memberi inspirasi pada perkembangan beberapa model komunikasi lainnya.*

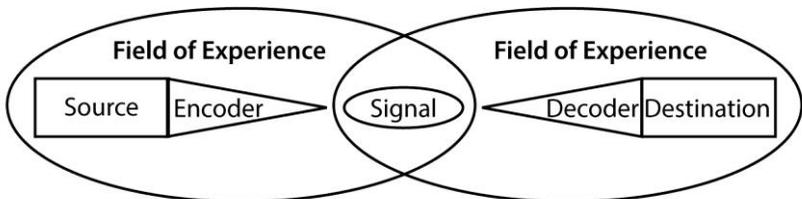


c. *Model Schramm (Severin dan Tankard, 2000)*

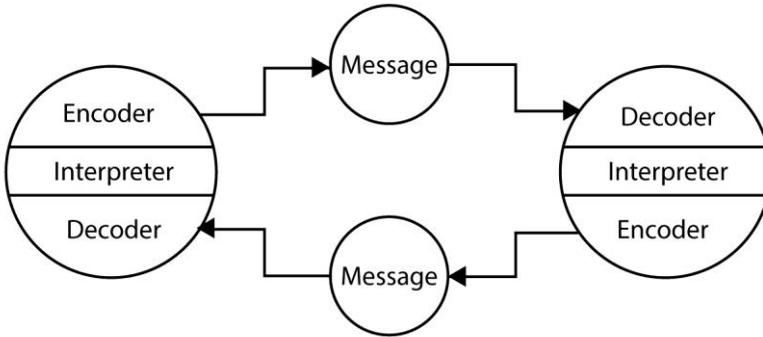
Model 1 mirip dengan model yang dibuat Shannon.



Model 2 memberi penekanan pada hal-hal yang ada dalam kerangka pengalaman yang sama saja, yang pada dasarnya dikomunikasikan.



Model 3 terkait dengan komunikasi sebagai interaksi antarpihak dalam melakukan *encoding*, *interpreting*, *decoding*, *transmitting*, dan *receiving* sinyal.



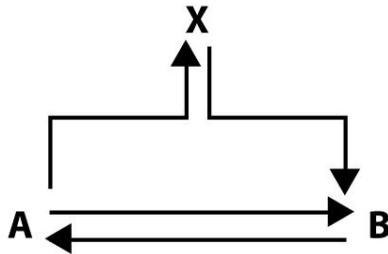
d. *Model Osgood (Severin dan Tankard, 2000)*

Dalam pandangan Osgood, model komunikasi Shannon dan Weaver tidaklah dimaksudkan untuk komunikasi antarmanusia. Osgood mengembangkan model komunikasi dari teorinya tentang makna dan dari proses psikolinguistik secara umum. Osgood kemudian menata ulang model Shannon dan Weaver, serta menamainya dengan unit komunikasi untuk mengirim dan menerima pesan. Tekanan dari model Osgood terletak pada 1) model komunikasi setidaknya harus mencakup dua unit komunikasi, yaitu unit sumber (*speaker*, pembicara) dan unit sasaran (*hearer*, pendengar), 2) di antara kedua unit itu, yang terhubung ke dalam satu sistem tunggal, terdapat pesan (*message*), 3) pesan merupakan bagian dari *output* keseluruhan (*responses*, tanggapan) dari unit sumber yang secara simultan dapat menjadi bagian dari input keseluruhan (*stimuli*, rangsangan) pada unit sasaran, dan 4) reaksi suatu individu yang menghasilkan rangsangan bagi individu lain dapat terjadi secara segera atau lebih lama.

e. *Model Simetri Newcomb (Severin dan Tankard, 2000)*

Model simetri Theodore Newcomb berpijak dari tindakan komunikasi saat A mentransmisikan kepada B tentang sesuatu (X) dan memandang orientasi atau sikap A kepada B dan sikap A kepada X adalah saling tergantung dan membentuk suatu sistem yang berisi empat hal, yaitu 1) orientasi A terhadap X, termasuk sikap kepada X sebagai objek yang didekati atau

dihindari yang dikarakterkan dengan tanda dan intensitas, serta atribut kognitif kepada X dalam wujud kepercayaan dan susunan kognitif, 2) orientasi A terhadap B, 3) orientasi B terhadap X, dan 4) orientasi B terhadap A.



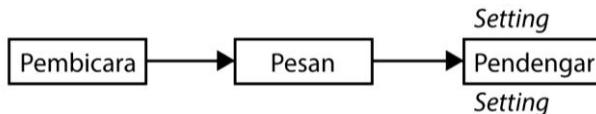
f. *Model Stimulus–Respons (Zacharis dan Bender, 1976:35)*

Merupakan model komunikasi paling sederhana yang mengasumsikan bahwa setiap rangsangan akan dibalas dengan tanggapan dan hal ini dapat bersifat timbal balik. Dalam beberapa literatur komunikasi, model stimulus-respons ini kerap dikenali sebagai Model S – R.



g. *Model Aristoteles*

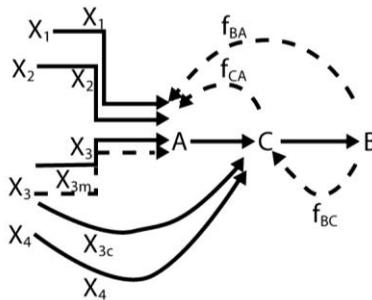
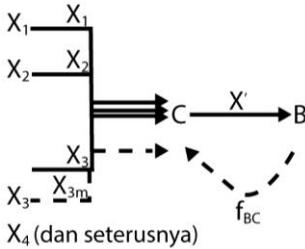
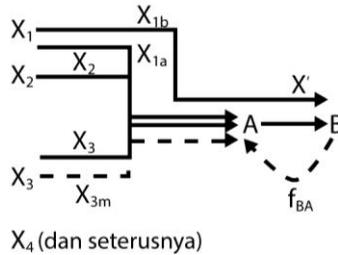
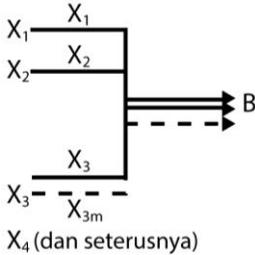
Juga dikenal sebagai model retorika, model ini berpijak pada proses komunikasi publik yang memasukkan unsur persuasi dengan bersandar pada *etos* (mirip dengan kredibilitas pembicara), *logos* (logika atau argumen dalam pembicaraan), dan *pathos* (emosi khalayak yang direkayasa). Dengan mengadopsi model yang disusun Michael Burgoon, model Aristoteles ini dibagikan Mulyana (2001: 135) sebagai berikut:



h. *Model Westley-MacLean (Severin dan Tankard, 2000)*

Model komunikasi dari Bruce Westley dan Malcolm MacLean ini mendasarkan pada model yang disusun Shannon dan Weaver, Lasswell, dan Newcomb dengan memasukkan umpan balik (*feedback*) untuk membedakan antara komunikasi antarperorangan (umpan balik bersifat *immediate* atau

segera) dan komunikasi massa (umpan balik bersifat *mediate*, minimal, atau tertunda). Perhatikan keempat gambar yang diadopsi dari model Westley-MacLean di bawah ini:



Uraian tentang sejarah perkembangan, delapan tradisi keilmuan, serta teori dan model komunikasi yang disajikan di muka kiranya dapat menyegarkan kembali ingatan dan pengetahuan Anda tentang ilmu komunikasi. Jika Anda merasa tetap belum bisa memperoleh gambaran lengkap tentang ilmu komunikasi, ada baiknya Anda untuk membacanya secara perlahan sambil mengingat hal-hal yang sudah Anda pelajari dalam modul Pengantar Ilmu Komunikasi. Anda juga dapat menghubungi mentor Anda secara *online*, baik mentor untuk Pengantar Ilmu Komunikasi maupun mentor untuk Komunikasi Politik ini.

Setelah Anda mencoba membangkitkan ingatan Anda tentang ilmu komunikasi, Anda dapat mempelajari ulang atau mengingat kembali tentang ilmu politik yang tentunya juga pernah Anda pelajari. Pada bagian berikut ini akan Anda temukan sejumlah pemahaman yang sekiranya dapat membantu Anda mengingat kembali tentang ilmu politik.

## **B. ILMU POLITIK**

Anda mungkin sering mendengar kalimat, “Orang selalu berpolitik”. Terlepas dari tempat atau cara mereka melakukannya, secara sederhana orang yang berpolitik bisa dilihat saat pengaturan dan pengawasan dilakukan, penerapan kekuasaan dinyatakan, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah ditentukan, serta sistem penjaminan untuk hal-hal ini ditegaskan. Contoh paling jelas untuk melihat orang berpolitik adalah saat terjadi perdebatan antar anggota dewan dalam memutuskan kebijakan atau saat dua kandidat presiden beradu visi dan misi.

Upaya untuk memahami ilmu politik di antaranya dapat ditempuh dengan melihat sejarah perkembangan ilmu politik, pengertian politik, serta konsep dan teori-teori politik yang tentunya pernah Anda pelajari. Uraian berikut tentang ilmu politik di bawah ini sekadar untuk membuka kembali ingatan dan pengetahuan Anda, yang tentunya akan menjadi ideal bila Anda dapat melanjutkannya kembali dengan membaca BMP Pengantar Ilmu Politik dan Sistem Politik Indonesia, sejumlah buku, jurnal, atau artikel lain tentang ilmu politik.

### **1. Sejarah dan Pengertian Ilmu Politik**

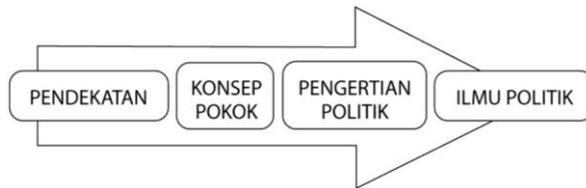
Secara umum, dapat dikatakan bahwa ilmu politik mulai dikenal dan kemudian berkembang di sekitar abad kelima sebelum Masehi. Petunjuk tentang hal ini di antaranya terlihat dengan adanya kitab Dharmasastra dan Astasastra (India, 500 SM), tokoh Confusius (Tiongkok, 500 SM), serta karya-karya Aristoteles, Plato, dan Herodatus (Yunani, 450 SM). Namun demikian, ilmu politik secara khusus atau ilmu politik modern bisa dikatakan baru muncul pada abad ke-18 hingga ke-19 di Jerman, Austria, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat yang kemudian berkembang semakin pesat setelah Perang Dunia II. Mirip dengan ilmu komunikasi, ilmu politik pun dapat disebut sebagai ilmu yang multidisipliner karena perkembangannya tidak terlepas dari hadirnya ilmu-ilmu sosial yang lain.

Pemahaman mengenai ilmu politik sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang umum digunakan dalam ilmu politik. Para penganut pendekatan kekuasaan (*power approach*) memandang ilmu politik sebagai disiplin ilmu empirik yang mengeksplorasi pembentukan dan pembagian kekuasaan, serta mencermati tindakan-tindakan politik seseorang, atau kelompok dalam perspektif kekuasaan. Bagi sejumlah ahli seperti Harold D. Lasswell (1950)

dan William A. Robson (1954), ilmu politik dimaknai sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan kekuasaan di masyarakat, termasuk tentang upaya untuk mencapai, mempertahankan, melaksanakan, dan/atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu. Hal ini tentunya berbeda dengan pengguna pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) yang menempatkan ilmu politik sebagai ilmu tentang negara, tujuan-tujuan negara, lembaga-lembaga pelaksana tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dan warga negaranya, serta hubungan antarnegara (Ryan, 2012; dan Heywood, 2013).

Hal yang berbeda juga terlihat dalam pandangan para ahli yang menggunakan pendekatan kebijakan publik (*public policy approach*). Easton (1971) secara tegas menyatakan bahwa ilmu politik adalah studi tentang pembuatan kebijakan. Dalam hal ini objek ilmu politik mencakup kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, dan berikut akibat-akibatnya (Kollman, 2012). Mirip dengan pendekatan ini adalah pendekatan pembuatan kebijakan (*decision making approach*) yang menekankan bahwa politik selalu terkait dengan pembuatan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan untuk seluruh masyarakat (Epstein dan O'Halloran, 1999; Hamlett, 1991; dan Deutsch, 1980). Pendekatan lain untuk memahami politik berdasarkan pada pemahaman tentang politik sebagai suatu arena yang mengatur distribusi atau pembagian nilai-nilai berdasar kewenangan untuk dan/atau atas nama masyarakat. Dalam pendekatan distribusi (*distribution approach*) ini, politik melibatkan hal-hal yang terkait dengan pengendalian, pengaruh, kekuasaan, serta kewenangan (Lasswell, 2011; serta Dahl dan Stinebrickner, 2002).

Terlepas dari sejumlah pendekatan yang dipakai untuk memahami ilmu politik, Budiardjo (2003) menyebutkan konsep-konsep pokok yang ada dalam ilmu politik selalu berkait dengan masalah negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy, beleid*), serta pembagian atau alokasi (*distribution* atau *allocation*). Dengan berdasar pada konsep-konsep pokok inilah kemudian muncul sejumlah pengertian ilmu politik, walaupun harus diakui bahwa dalam memberikan definisi ilmu politik ini, sejumlah ahli ada yang memberi penekanan pada konsep-konsep tertentu.



Gambar 1.4  
Pendekatan, Konsep Pokok, dan Pengertian Politik

Anda sendiri tentunya mulai dapat menyusun suatu pengertian sendiri tentang ilmu politik dengan berdasar konsep-konsep pokok politik di atas. Anda dapat menyusun beberapa pengertian ilmu politik, jika masing-masing pengertiannya Anda susun berdasar masing-masing konsep. Anda pun dapat mencoba sendiri untuk menyusun suatu pengertian tunggal tentang ilmu politik, bila Anda menggunakan keseluruhan konsep pokok itu secara bersama.

Anda pun tentunya masih ingat tentang ruang lingkup ilmu politik modern atau ilmu politik kontemporer yang mencakup sembilan hal. Kesembilan hal ini adalah pemikiran politik, teori politik, sejarah politik, analisis politik perbandingan, administrasi publik, kebijakan publik, sosiologi politik, hubungan internasional, serta teori-teori kenegaraan (Dunleavy dan O’Leary, 1998). Terkait dengan modul komunikasi politik yang sedang Anda pelajari ini, di bagian berikut akan disajikan tentang teori politik, sedangkan cakupan ruang lingkup yang lain ada baiknya bila Anda baca ulang kembali untuk mengingatnya.

## 2. Teori Politik

Teori politik pada dasarnya hanya salah satu bidang dalam ilmu politik (Sargent, 2008; Kymlicka, 2001; dan Adamovic et.al, 1950). Teori politik dapat diartikan sebagai bahasan sistematis dan generalisasi fenomena politik yang dapat bersifat spekulatif, deskriptif, komparatif, atau berdasar logika (Budiardjo, 2003). Di samping teori politik, terdapat juga bidang yang terkait dengan lembaga-lembaga politik, partai dan golongan politik, hubungan internasional, serta pembangunan politik.

Seperti telah disinggung di muka, Anda dapat memahami teori politik dengan langkah-langkah pemahaman sebagai berikut.

- a. Teori politik merupakan generalisasi atas fenomena yang bersifat politik yang di antaranya berupa fenomena dari tujuan dan kegiatan politik, cara

pencapaian tujuan politik, kemungkinan dan kebutuhan terhadap situasi politik tertentu, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk mengupayakan pencapaian tujuan politik (Budiardjo, 2003).

- b. Teori-teori politik dibangun dari sejumlah konsep, yang di dalam teori politik setidaknya berkait dengan masyarakat, kelas sosial, negara, kedaulatan, kekuasaan, hak, kewajiban, pembangunan politik, modernisasi, dan perubahan sosial (Budiardjo, 2003).
- c. Sebagian teori politik memulainya dengan berlandaskan pada konsep tentang sifat manusia, kebutuhan dan kepentingan umat manusia, tafsir dan pengaturan institusi untuk memenuhi kehidupan politik manusia, serta pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan politik (Ryan, 2012 dan Kymlicka, 2001).
- d. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, dasar-dasar teori politik itu dikembangkan di benua Eropa dan Amerika Serikat. Perkembangan teori politik yang lebih pesat terjadi setelah Perang Dunia II yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran positivisme (Ryan, 2012).
- e. Setidaknya terdapat dua kelompok teori politik, yaitu teori politik valuational dan nonvaluational. Teori politik valuational berlandaskan pada dasar moral yang menentukan norma-norma politik, sedangkan teori politik nonvaluational membahas tentang fenomena atau fakta-fakta kehidupan politik yang bisa bersifat deskriptif maupun komparatif (Salkever, 2014; dan Honiq, 1993).
- f. Teori politik valuational membahas tentang ideologi, filsafat politik, dan teori politik sistematik (Budiardjo, 2003). Contoh dari beberapa ideologi atau doktrin politik adalah Marxisme-Leninisme (D'Amato, 2006 dan Sowell, 1985), Fascisme (Paxton, 2005), Liberalisme (Fawcett, 2014), dan Demokrasi (Tilly, 2007 dan Dahl, 2000). Filsafat politik mencakup penjelasan yang didasarkan pada akal atau rasio dengan pokok pikiran bahwa hal-hal yang berkaitan dengan alam raya perlu diselesaikan dulu sebelum persoalan-persoalan politik dapat dipecahkan. Plato dan John Locke merupakan dua dari sekian tokoh yang pemikiran politiknya sangat dikagumi (Macpherson, 2011; Kymlicka, 2001; Cooper dan Hutchinson, 1997; serta Sigmund, 2005). Teori politik sistematik terkait dengan penerapan norma-norma dalam suatu program politik yang secara tidak langsung biasanya merupakan kelanjutan dari filsafat politik (Kymlicka, 2001 dan Heyneman, 1995).

- g. Teori-teori dominan dalam ilmu politik di antaranya adalah teori politik kekuasaan – Niccolo Machiavelli, teori negara berdaulat – Jean Bodin, teori kekuasaan negara terbatas – John Locke, teori pemisahan kekuasaan – Baron de Montesquieu, serta teori hak pemilikan legal – Robert Nozick (Dunleavy dan O’Leary, 1998; serta Ryan, 2012).

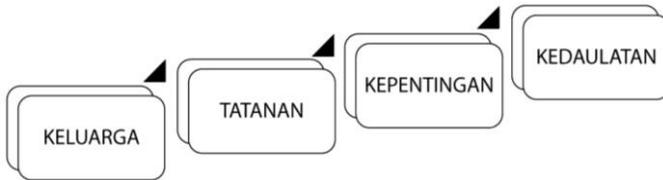
Tujuh langkah di atas kiranya dapat membantu Anda untuk lebih cepat memetakan teori-teori politik yang ada. Harus diakui, ketujuh langkah dasar di atas tentunya belum bisa menempatkan sejumlah teori mutakhir dalam kajian ilmu politik. Untuk bisa mendapati dan memahami teori-teori politik secara menyeluruh, ada baiknya bila Anda membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal, dan artikel tentang ilmu politik yang lain, atau setidaknya membuka kembali modul Pengantar Ilmu Politik yang pernah Anda pelajari.

Berikut coba Anda segarkan ingatan kembali dengan mengenali beberapa tokoh yang melahirkan sejumlah teori politik. *Pertama*, Niccolo Machiavelli yang mengajukan analisis empirik rasional tentang negara, yang kemudian dianggap sebagai kunci utama untuk memahami politik modern dan ilmu politik kontemporer. Lahir pada tahun 1469 di kota Florence (Italia), Machiavelli menghadirkan gagasan tentang *principality* dan *republic*. Machiavelli mengedepankan pemikiran tentang negara berdasar kekuasaan yang di antaranya harus dicapai dengan semangat keprajuritan, ketegasan, kekejaman, kedisiplinan, kontrol diri, dan keberanian (Skinner, 1990).



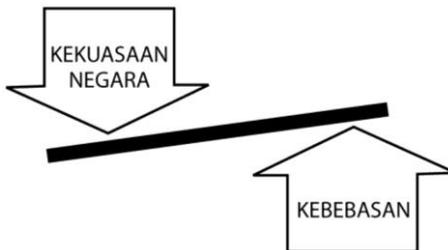
Gambar 1.5  
Negara dan Individu ala Machiavelli

*Kedua*, Jean Bodin yang lahir di Anjou (Perancis) pada tahun 1530 dan menekankan peran sentral keluarga dalam negara. Teori negara berdaulat yang dikedepankan olehnya memandang keluarga dan bukan individu, dapat digunakan untuk membentuk persemakmuran. Bagi Bodin, negara adalah pemerintahan yang tertata dari sejumlah keluarga serta kepentingan bersama mereka, dengan didasari kekuasaan yang berdaulat (Franklin, 2009 dan Ozment, 1981).



Gambar 1.6  
Dari Keluarga ke Negara

*Ketiga*, John Locke yang lahir 1632 di Wrington-Somerset sekitar 16 km dari Bristol, mengajukan argumen tentang perlunya kekuasaan negara yang terbatas untuk menghindari kesewenang-wenangan. Landasan pemikiran Locke terletak pada pengagungannya terhadap individu yang memiliki kemerdekaan, kebebasan, dan kesetaraan, serta tidak harus tunduk pada superioritas legislatif. Namun, Locke juga menggarisbawahi perlunya sifat beradab dan rasional manusia dalam menggunakan kemerdekaan, kebebasan, dan kesamaan derajat itu (Sigmund, 2005 dan Nidditch, 1979).



Gambar 1.7  
Kekuasaan Negara yang Dibatasi

*Keempat*, pemikiran tentang teori pemisahan kekuasaan yang diajukan Baron de Montesquieu. Lahir pada tahun 1689 di Paris, Montesquieu menghasilkan karya *De L'esprit des Lois* pada tahun 1748 atau tujuh tahun sebelum dia meninggal. Menurutnya, yang dapat mengoptimalkan dan menyeimbangkan kebebasan adalah negara dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang terpisah sehingga hukum sipil dapat dibuat dan diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Montesquieu juga berpendapat bahwa bentuk pemerintahan yang tepat adalah pemerintahan yang sesuai dengan karakter orang-orang yang mendiami wilayah itu, baik dalam bentuk republik, monarki, dan despotik. Hukum dibutuhkan untuk mengatur hubungan antarbangsa merdeka, antarindividu, serta antara penguasa dan rakyat (Rahe, 2010).



Gambar 1.8  
Pemisahan Kekuasaan

*Kelima*, Robert Nozick yang lahir 1938 di Brooklyn (Amerika Serikat) mengedepankan teori tentang legalitas hak kepemilikan. Menurut Nozick, individu berkuasa dan memiliki hak yang bahkan tidak seorang atau kelompok mana pun boleh mencampuri. Lebih jauh dia menyatakan, intervensi pemerintah merupakan suatu bentuk pelanggaran atas dasar hak-hak moral yang dimiliki individu. Dengan berdasar pada hak bebas individu inilah, menurutnya distribusi yang adil tercapai hanya bila dilakukan atas pertukaran secara bebas (*free exchange*). Dia pun meyakini bahwa dengan cara seperti itulah maka proefisiensi akan dapat terjadi secara maksimal (Wolff, 1991 dan Nozick, 2013).



Gambar 1.9  
Hak Kepemilikan Legal Individu

Dengan memahami materi pada kegiatan belajar 1 dari modul pertama ini, Anda telah mengingat dan mengulang kembali gambaran tentang ilmu komunikasi dan ilmu politik yang sangat penting untuk melangkah lebih jauh dalam memahami komunikasi politik. Ingat, pada dasarnya setiap modul yang telah Anda pelajari memiliki kegunaan dalam mempelajari modul-modul berikutnya, termasuk modul tentang komunikasi politik.

Untuk melihat kemampuan Anda dalam mengingat kembali ilmu komunikasi dan ilmu politik, cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Ceritakan secara ringkas perkembangan ilmu komunikasi yang terjadi di Eropa dan di Amerika Serikat!
- 2) Sebutkan delapan tradisi keilmuan komunikasi dan jelaskan!
- 3) Berikan dua contoh model atau teori komunikasi yang terkait dengan komunikasi interpersonal, dan dua model atau teori komunikasi yang terkait dengan komunikasi massa!
- 4) Sebutkan lima pendekatan yang dipakai untuk memahami ilmu politik! Dapatkah Anda menjelaskannya kelima pendekatan itu!

- 5) Ceritakan tentang pemikiran John Locke dan Baron de Montesquieu yang memberi pengaruh besar dalam teori politik!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Pelajari kembali perkembangan ilmu komunikasi dalam kegiatan belajar 1 yang awalnya dipengaruhi oleh pemikiran Darwin tentang teori evolusi dan Freud tentang factor-faktor yang terkait dengan ketidaksadaran manusia. Di Amerika Serikat, pengikut pemikiran Freud mengembangkan ilmu komunikasi melalui studi interaksional (*interactional communication*) mengantar The Palo Alto Group pada diktum “one cannot not communicate”, pergeseran paradigm, pemfokusan pada persoalan-persoalan komunikasi, dan adanya faktor-faktor nonverbal, unintentional, paradox creating, dan useful sebagai teknik terapi dalam komunikasi antarmanusia. Selanjutnya adalah ilmu komunikasi dipengaruhi aliran kritis yang memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dengan pengikut aliran empiris. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Karl Marx, memperdalam ilmu hukum dan filsafat, serta pengkritik keras kapitalisme yang meluas hingga menjadi pusat kajian The Frankfurt School (*critical school*). Pengikut aliran kritis, melalui pandangan makro mereka, lebih mengkritisi persoalan “siapa yang memiliki dan mengontrol media” dengan bersandar pada postulat bahwa media massa dimanfaatkan untuk mengontrol masyarakat. Sebaliknya pengikut aliran empiris lebih berfokus pada pandangan mikro tentang pengaruh media, atas dasar pemikiran bahwa media massa mampu membenahi persoalan-persoalan sosial yang mengarah pada suatu perubahan sosial
- 2) Tradisi pertama adalah berkaitan dengan proses komunikasi sebagai pengaruh dari suatu hubungan interpersonal. Tradisi ini dikenal dengan *the socio-psychological tradition*. Tradisi kedua dikenal dengan *the cybernetic tradition* yang memandang komunikasi sebagai proses pentransmisionian informasi. Tradisi ketiga adalah *the rhetorical tradition* menempatkan komunikasi sebagai suatu aktivitas seni yang ditujukan kepada publik dengan landasan bahwa komunikasi adalah seni berbicara kepada umum (tradisi retorika klasik). Tradisi keempat, *the semiotic tradition* memandang komunikasi sebagai suatu proses pemaknaan bersama simbol-simbol komunikasi. Tradisi kelima, *the socio-cultural*

tradition memaknai proses komunikasi sebagai upaya penciptaan dan pembentuk realitas sosial. Tradisi keenam, *the critical tradition* meyakini komunikasi sebagai “a reflective challenge of unjust discourse” yang membedah perbedaan antara nilai-nilai kebebasan dan persamaan di dunia liberal, serta pemusatan dan pelanggaran kekuasaan yang menyebabkan nilai-nilai itu sekadar sebagai sebuah mitos. Tradisi ketujuh, mirip dengan tradisi semiotik, *the phenomenological tradition* memaknai komunikasi sebagai bertemunya pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain melalui sebuah dialog. Tradisi kedelapan, *the ethical tradition* memandang proses komunikasi dalam kaitannya dengan tanggung jawab etik manusia yang menginteraksikan karakter secara lugas dan menguntungkan

- 3) Teori komunikasi yang terkait dengan komunikasi interpersonal dikemukakan oleh, Judee Burgoon (2003) menyodorkan *the expectancy violations theory* dan bersama Buller mengulas *the interpersonal deception theory*. Selain mereka, Altman dan Taylor (2003) mendiskusikan *the social penetration theory*, Berger (2003) dengan *the uncertainty reduction theory*, Sherif (2003) dengan *the social judgment theory*, serta Festinger (2003) dengan *the cognitive dissonance theory*-nya. Sedangkan model komunikasi yang terkait dengan komunikasi massa adalah Model Lasswell, Model Matematik, Model Schramm Model Simetri Newcomb, Model Stimulus–Respon, Model Aristoteles, Model Westley-MacLean
- 4) *Pertama*, pendekatan kekuasaan (power approach) sebagai disiplin ilmu empirik yang mengeksplorasi pembentukan dan pembagian kekuasaan, serta mencermati tindakan-tindakan politik seseorang, atau kelompok dalam perspektif kekuasaan. *Kedua*., pendekatan kelembagaan (institutional approach) yang menempatkan ilmu politik sebagai ilmu tentang negara, tujuan-tujuan negara, lembaga-lembaga pelaksana tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dan warga negaranya, serta hubungan antarnegara. *Ketiga*, pendekatan kebijakan publik (public policy approach) bahwa ilmu politik adalah studi tentang pembuatan kebijakan. Dalam hal ini objek ilmu politik mencakup kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, dan berikut akibat-akibatnya. *Keempat*, pendekatan pembuatan kebijakan (decision making approach) yang menekankan bahwa politik selalu terkait dengan pembuatan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan untuk seluruh masyarakat. *Kelima*, pendekatan

distribusi (distribution approach) berdasarkan pada pemahaman tentang politik sebagai suatu arena yang mengatur distribusi atau pembagian nilai-nilai berdasar kewenangan untuk dan/atau atas nama masyarakat.

- 6) John Locke mengajukan argumen tentang perlunya kekuasaan negara yang terbatas untuk menghindari kesewenang-wenangan. Landasan pemikiran Locke terletak pada pengagungannya terhadap individu yang memiliki kemerdekaan, kebebasan, dan kesetaraan, serta tidak harus tunduk pada superioritas legislatif. Locke juga menggarisbawahi perlunya sifat beradab dan rasional manusia dalam menggunakan kemerdekaan, kebebasan, dan kesamaan derajat itu. Pemikiran Montesquieu menekankan pada pemisahan kekuasaan. Negara dapat mengoptimalkan dan menyeimbangkan kebebasan dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang terpisah sehingga hukum sipil dapat dibuat dan diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Montesquieu juga berpendapat bahwa bentuk pemerintahan yang tepat adalah pemerintahan yang sesuai dengan karakter orang-orang yang mendiami wilayah itu, baik dalam bentuk republik, monarki, dan despotik. Hukum dibutuhkan untuk mengatur hubungan antarbangsa merdeka, antarindividu, serta antara penguasa dan rakyat.



## RANGKUMAN

---

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu komunikasi tidak dapat dipisahkan dari penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, teori evolusi Charles Darwin, psikoanalisis Sigmund Freud, dan *The Frankfurt School* – Karl Marx (Jerman). Migrasi intelektual menandai migrasi tradisi keilmuan Eropa ke perkembangan teori-teori ilmu komunikasi di Amerika. Rogers (1994) menyebut Wilbur Schramm sebagai tokoh utama perkembangan ilmu komunikasi di Amerika, selain nama-nama seperti Harold D. Laswell, Kurt Lewin, Paul F. Lazarsfeld, Carl I. Hovland, Norbert Wiener, dan Claude E. Shannon. Sedangkan, *The Chicago School* disebut sebagai institusi berpengaruh yang membuat ilmu komunikasi diakui keberadaannya.

Terdapat tiga catatan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ilmu komunikasi, yaitu bahwa pertumbuhan ilmu komunikasi sama sekali tak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran tokoh-tokoh intelektual yang bukan ahli komunikasi, pemikiran mereka yang merambah ke ilmu komunikasi menjadikan ilmu komunikasi sebagai ilmu multidisipliner,

dan terlihat adanya satu rantai sejarah yang hilang berupa dinamika studi komunikasi yang tak tercatat selama hampir 1.400 tahun.

Dalam ilmu komunikasi dikenal adanya delapan tradisi keilmuan, yaitu *the socio-psychological tradition*, *the cybernetic tradition*, *the rhetorical tradition*, *the semiotic tradition*, *the socio-cultural tradition*, *the critical tradition*, *the phenomenological tradition*, dan *the ethical tradition*. Tradisi sosio-psikologis, retorika, dan fenomenologis berkecenderungan pada komunikasi interpersonal. Tradisi sibernetik, semiotik, sosio-kultural, kritis, dan etis mengarah pada perkembangan komunikasi massa. Di antara kedua penguatan ini terselenggara juga satu kutub lain yang biasa disebut sebagai komunikasi publik dan kelompok.

Terdapat berbagai macam teori komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, maupun komunikasi massa. Beberapa teori/model yang banyak dikenal adalah model Lasswell, model Schramm, model matematik, model Osgood, model simetrik Newcomb, model Westley-MacLean, dan model Gerbner.

Ilmu politik mulai dikenal dan kemudian berkembang di sekitar abad kelima sebelum Masehi. Namun demikian, ilmu politik secara khusus atau ilmu politik modern bisa dikatakan baru muncul pada abad ke-18 hingga ke-19 di Jerman, Austria, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat yang kemudian berkembang semakin pesat setelah Perang Dunia II. Ilmu politik disebut sebagai ilmu yang multidisipliner karena perkembangannya tidak terlepas dari hadirnya ilmu-ilmu sosial yang lain.

Pemahaman mengenai ilmu politik sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang umum digunakan dalam ilmu politik. Pendekatan yang biasa digunakan adalah pendekatan kekuasaan (*power approach*), pendekatan kelembagaan (*institutional approach*), pendekatan kebijakan publik (*public policy approach*), pendekatan pembuatan kebijakan (*decision making approach*), dan pendekatan distribusi (*distribution approach*). Sedangkan konsep-konsep pokok yang ada dalam ilmu politik berkaitan dengan masalah negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy, beleid*), serta pembagian atau alokasi (*distribution* atau *allocation*). Sedangkan, ruang lingkup ilmu politik modern atau ilmu politik kontemporer mencakup sembilan hal, yaitu pemikiran politik, teori politik, sejarah politik, analisis politik perbandingan, administrasi publik, kebijakan publik, sosiologi politik, hubungan internasional, serta teori-teori kenegaraan.

Teori politik hanyalah salah satu bidang dalam ilmu politik dan dapat diartikan sebagai bahasan sistematis dan generalisasi fenomena politik yang dapat bersifat spekulatif, deskriptif, komparatif, atau berdasar logika. Di samping teori politik, terdapat juga bidang yang terkait dengan

lembaga-lembaga politik, partai dan golongan politik, hubungan internasional, serta pembangunan politik.

Seperi telah disinggung di muka, Anda dapat memahami teori politik dengan langkah-langkah pemahaman sebagai berikut. Setidaknya terdapat dua kelompok teori politik, yaitu teori politik valuational dan nonvaluational. Teori politik valuational berlandaskan pada dasar moral yang menentukan norma-norma politik, sedangkan teori politik nonvaluational membahas tentang fenomena atau fakta-fakta kehidupan politik yang bisa bersifat deskriptif maupun komparatif. Teori politik valuational membahas tentang ideologi, filsafat politik, dan teori politik sistematis. Teori-teori dominan dalam ilmu politik di antaranya adalah teori politik kekuasaan (Niccolo Machiavelli), teori negara berdaulat (Jean Bodin), teori kekuasaan negara terbatas (John Locke), teori pemisahan kekuasaan (Baron de Montesquieu), serta teori hak pemilikan legal (Robert Nozick).



#### TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tiga tokoh di Eropa yang berjasa dalam kelahiran ilmu komunikasi adalah....
  - A. Carl I. Hovland, Wilbur Schramm, dan Paul F. Lazarsfeld
  - B. Gutenberg, Harold D. Laswell, dan Carl I. Hovland
  - C. Charles Darwin, Sigmund Freud, dan Karl Marx
  - D. Kurt Lewin, Claude E. Shannon, dan Sigmund Freud
  
- 2) Di antara hal-hal di bawah ini, mana yang paling benar?
  - A. Johannes Gutenberg penemu mesin cetak – Sigmund Freud dengan teori evolusi.
  - B. Charles Darwin (Inggris) – Johannes Gutenberg penemu mesin cetak.
  - C. The Palo Alto School di Eropa – The Frankfurt School di Eropa.
  - D. Migrasi keilmuan komunikasi dari Amerika Serikat ke Eropa.
  
- 3) Pemahaman tentang komunikasi sebagai proses pentransmisi informasi dan sebagai suatu proses yang linier merupakan dasar ide dari tradisi....
  - A. Ethical
  - B. Semiotic
  - C. Cybernetic
  - D. Phenomenological

- 4) Pendekatan yang menempatkan ilmu politik sebagai ilmu tentang negara, tujuan-tujuan negara, lembaga-lembaga pelaksana tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dan warga negaranya, serta hubungan antarnegara, dikenal dengan pendekatan....
- institusional
  - kebijakan publik
  - kekuasaan
  - distribusi
- 5) Pandangan tentang negara yang dapat mengoptimalkan dan menyeimbangkan kebebasan bila kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah disampaikan oleh....
- John Locke
  - Niccolo Machiavelli
  - Robert Nozick
  - Baron de Montesquieu

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

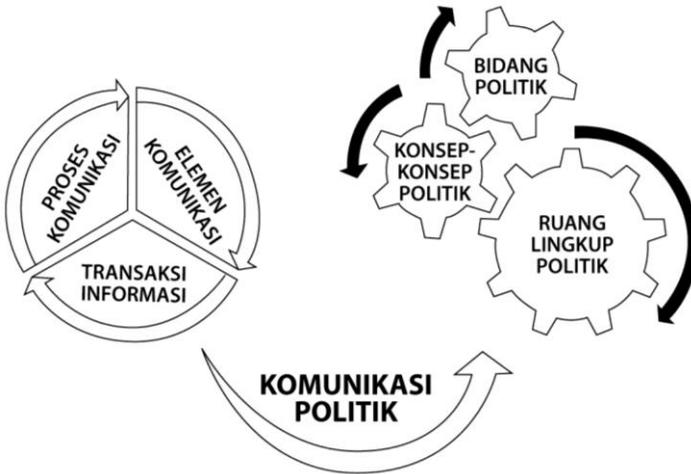
Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 2****Pengertian Komunikasi Politik**

Langkah-langkah untuk memahami komunikasi politik dapat dilakukan dengan memadukan elemen-elemen komunikasi dengan segala hal yang terkait dengan aktor, lembaga, partai dan golongan, hubungan internasional, serta pembangunan politik. Selain itu komunikasi politik dapat dipahami dengan cara memadukan elemen-elemen komunikasi dan konsep-konsep pokok yang ada dalam ilmu politik, seperti negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, serta pembagian atau alokasi. Hal yang sama dapat dilakukan dengan menabulasilangkan antara elemen-elemen komunikasi dan pemikiran politik, teori politik, sejarah politik, analisis politik perbandingan, administrasi publik, kebijakan publik, sosiologi politik, hubungan internasional, serta teori-teori kenegaraan.

Cara yang lebih sederhana untuk memahami komunikasi politik dapat dilakukan dengan melihat setiap fenomena komunikasi yang kemudian berdampak politik. Artinya, bila suatu fenomena komunikasi yang biasanya dicirikan dengan terjadinya transaksi informasi atau penyusunan, pengiriman, dan penerimaan pesan kemudian terlihat memiliki dampak politik, hal inilah yang kemudian menjadi satu pemahaman tentang komunikasi politik. Sekadar mengingatkan, elemen-elemen komunikasi dapat mewujudkan dalam komunikator, pesan, media, komunikan, umpan balik, efek, gangguan, *encoding*, dan *decoding*. Sedangkan fenomena komunikasi dapat diartikan sebagai kejadian-kejadian atau berbagai proses yang melibatkan penyusunan, pengiriman, dan penerimaan pesan dari komunikator ke komunikan dengan efek tertentu. Namun demikian, ada juga yang berpandangan bahwa komunikasi politik terjadi manakala proses komunikasi terjadi dengan melibatkan pesan-pesan politik, aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Hanya saja, pandangan yang di belakang ini, cenderung melihat komunikasi politik dalam arah yang ke bawah dan horizontal tentunya.



Gambar 1.10  
Komunikasi dan Politik

## A. KECENDERUNGAN ARAH KOMUNIKASI POLITIK

Anda semua tentu menyadari bahwa komunikasi terjadi dan berlangsung di manapun, kapan pun, dan dengan cara apa pun. Dengan mengingat pada diktum The Palo Alto Group, “*one cannot not communicate*”, maka pada dasarnya setiap aktivitas manusia tak dapat dipisahkan dari kegiatan komunikasi ini (Watzlawick; Beavin dan Jackson, 1967). Konsekuensinya kemudian, komunikasi politik pun terjadi dalam berbagai arena, alasan, isi pesan, tujuan, cara, saluran, dan akibat, termasuk arena, alasan, isi, tujuan, cara, dan akibat yang bersentuhan dengan kehidupan politik.

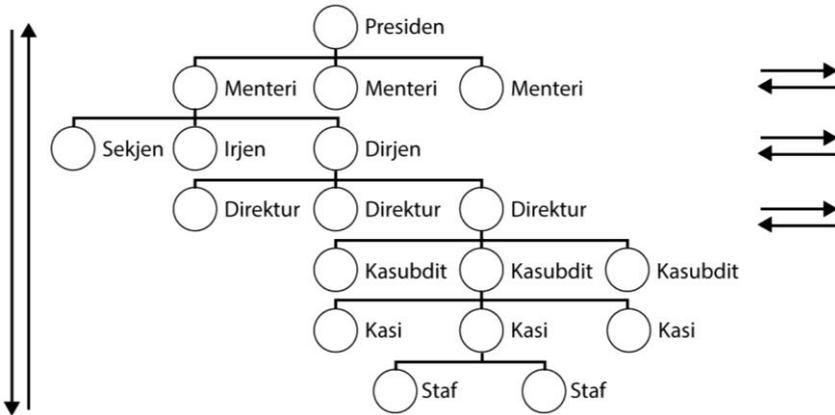
Seperti telah disinggung pada saat Anda mengawali modul ini, Norris (2010) menyebutkan tiga arah dominan yang dapat terjadi ketika komunikasi politik terjadi. *Pertama*, ke bawah (*down-wards*) yang terjadi saat proses komunikasi dengan dampak politik terjadi antara, misalnya Presiden dan rakyat yang dikunjunginya, atau antara pemilik perusahaan dan para pekerja. Ingat bahwa dialog sebagai salah satu bentuk komunikasi antara Presiden dan rakyat yang dikunjunginya bisa jadi tidak berdampak politik atau setidaknya tanpa akibat politik langsung. Ingat juga bahwa saat pemilik perusahaan dan para pekerja berkomunikasi belum tentu hal ini berdampak politik, semisal pemecatan manajer bagian produksi akibat tuntutan para pekerja. Komunikasi

politik yang mengarah ke bawah hanya terjadi manakala komunikasi dari penguasa (pemilik kekuasaan) ke pihak yang memberi kuasa atau dikuasai kemudian berdampak pada suatu tindakan, kebijakan, atau hasil politik tertentu.

*Kedua*, komunikasi politik horizontal dapat diidentifikasi manakala terjadi proses pertukaran informasi atau transaksi informasi antarpihak yang memiliki kedudukan relatif setara dan yang kemudian memunculkan tindakan-tindakan atau hasil-hasil yang bersifat politik. Tidak bisa dipungkiri, sama seperti komunikasi politik ke bawah, komunikasi horizontal pun pada dasarnya dapat terjadi tanpa kemudian berakibat pada tindakan atau hasil yang bersifat politik. Anda tentunya segera dapat melakukan identifikasi sendiri untuk menentukan mana kegiatan komunikasi horizontal yang berdampak dan yang tidak berdampak secara politik, walaupun kadang-kadang memang sulit untuk memisahkan antara dampak politik yang terlihat jelas serta langsung, dan dampak politik yang tidak kentara. Satu solusinya, Anda dapat belajar memperkirakan tingkatan dampak politik yang akan terjadi.

*Ketiga*, komunikasi politik dengan arah ke atas (*upwards*) yang tertangkap saat suatu proses komunikasi berdampak politik lebih melibatkan penyusunan dan pengiriman pesan dari komunikator di tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi, atau bahkan ke tingkat yang tertinggi. Seorang Menteri yang melaporkan kepada Presiden tentang adanya gejolak di masyarakat terhadap rencana Pemerintah menaikkan harga BBM dan kemudian bermuara pada keputusan untuk menunda pelaksanaan kenaikan harga BBM, dapat disebut sebagai contoh komunikasi *upwards* ini. Opini publik yang kuat dan menyebar luas tentang parahnya tindak pidana korupsi dan yang kemudian berujung pada keputusan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan contoh yang lain. Gerakan *People Power* di Filipina beberapa tahun silam, yang kemudian mengakhiri masa kepresidenan Ferdinand Marcos tentunya dapat dikaitkan dengan komunikasi politik yang mengarah ke atas.

Sekarang Anda perhatikan contoh berikut yang secara khusus menunjukkan lingkungan pekerjaan di suatu kementerian. Sederhanakan saja, Menteri adalah pembantu Presiden dan pelaksanaan tugas Menteri dibantu oleh sejumlah pimpinan dan staf di bawahnya. Dari gambar yang ada nanti, akan terlihat kecenderungan arah komunikasi yang berlangsung, dan coba Anda pikirkan sendiri isu-isu apa saja yang ada di lingkungan pekerjaan kementerian ini yang dapat memiliki dampak politik.



*Catatan:* Sekjen = Sekretaris Jenderal, Irjen = Inspektur Jenderal, Dirjen = Direktur Jenderal, Kasubdit = Kepala Subdirektorat, dan Kasi = Kepala Seksi

Gambar 1.11  
Struktur di Lingkungan Kerja Kementerian

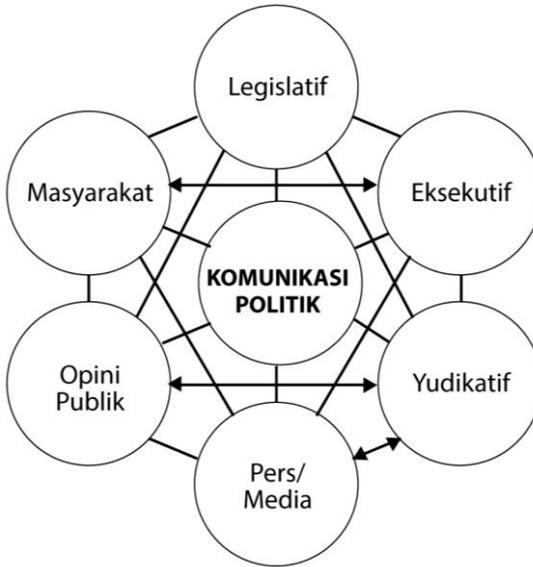
Gambar di atas menunjukkan kemungkinan arah komunikasi ke bawah (dari Presiden ke tingkat paling rendah), arah komunikasi ke atas (dari tingkat bawah ke Presiden), meskipun dalam kenyataannya akan ke bawah atau ke atas secara berjenjang, serta arah komunikasi horizontal yang dapat terjadi pada setiap jenjang di bawah Presiden. Sekali lagi, Anda tinggal mencoba memperkirakan proses komunikasi dengan segala arahnya itu yang dapat berdampak politik. Jangan ragu untuk bertanya kepada mentor modul Komunikasi Politik Anda, bila Anda merasa kesulitan.

Namun demikian, hanya tiga arah (ke bawah, ke atas, dan horizontal) ini sajakah proses komunikasi atau transaksi informasi yang memiliki dampak politik? Tidakkah terbuka kemungkinan arah atau bentuk kecenderungan komunikasi politik yang lain? Benar sekali. Ada berbagai bentuk kecenderungan atau arah dalam komunikasi politik. Penyebutan tiga arah yang dinyatakan Norris di atas, pada dasarnya hanya untuk menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak sekadar dari atas ke bawah (*up-down*) saja.

Coba Anda nyatakan kecenderungan arah komunikasi politik lainnya. Tentu Anda bisa membayangkan adanya bentuk komunikasi politik diagonal (misalnya, dari Kasubdit A ke Sekjen, atau saat Sekjen memanggil Kasubdit

C). Anda juga dapat mereka-reka komunikasi politik yang arahnya melingkar ke atas (sebagai contoh dari Dirjen ke Direktur, ke Kasubdit, ke Kasi, ke staf, kembali ke Kasi, ke Kasubdit, ke Direktur, dan akhirnya ke Dirjen kembali.). Anda juga dapat memperkirakan terjadinya komunikasi politik yang berbentuk roda (umpamanya saat seluruh Direktur dalam satu direktorat jenderal berdialog dengan Dirjen). Atau, Anda juga bisa membayangkan arah komunikasi politik yang cenderung membuat bentuk bintang. Pikirkan sejenak, bagaimana arah komunikasi politik berbentuk bintang ini dapat terjadi dalam lingkungan kerja di kementerian yang seperti itu. Sebagai catatan, seorang Menteri dimungkinkan untuk memiliki Staf Ahli dan staf khusus. Catatan lainnya, kementerian tertentu memiliki Wakil Menteri yang bertugas membantu Menteri dalam pelaksanaan tugasnya.

Jika pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dilontarkan Montesquieu, pemikiran tentang pers sebagai pilar keempat demokrasi, dan opini publik digunakan, wujud komunikasi politik yang terjadi akan semakin terlihat arahnya (Rahe, 2010; Gupta, 2012; serta Clawson dan Oxley, 2012). Coba Anda lihat Gambar 1.12. Saat berbagai proses komunikasi atau transaksi informasi berlangsung dengan melibatkan legislatif, eksekutif, yudikatif, suara muncul dalam opini publik, dan media massa baik secara keseluruhan atau di antara beberapa yang ada, dan memiliki dampak politik, maka arah komunikasi politik bisa bermacam-macam. Hal ini akan semakin menunjukkan banyak arah manakala komunikasi politik yang terjadi di dalam masing-masing unsur tadi ikut digambarkan. Intinya, komunikasi politik pada dasarnya berlangsung di sekitar kita dengan ataupun tanpa disadari. Hanya saja, karena terpaan informasi yang terjadi ke dalam diri individu begitu banyak ragamnya, orang kemudian cenderung menyadari adanya komunikasi politik saat dampak politik terlihat nyata, atau setidaknya bila komunikasi yang terjadi dilakukan oleh aktor-aktor, partai-partai, atau lembaga-lembaga politik.

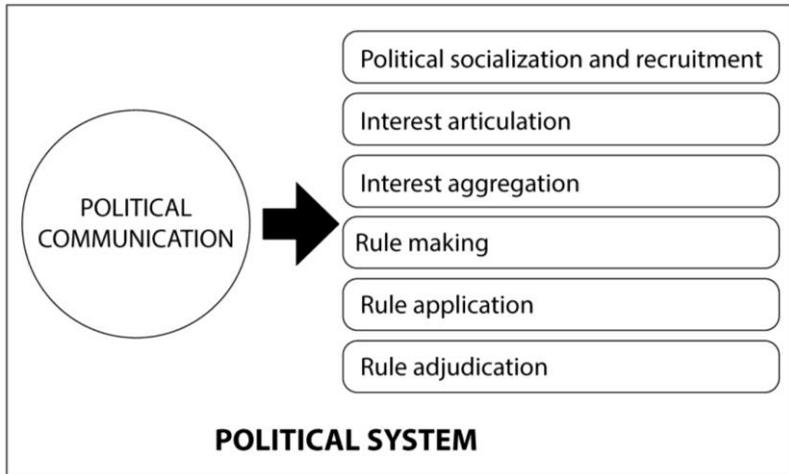


Gambar 1.12  
Komunikasi Politik dan Demokrasi

Uraian di depan memberi landasan untuk memahami pengertian komunikasi politik secara lebih lengkap, seperti yang diberikan oleh sejumlah ahli dan pemerhati komunikasi politik. Patut dicatat bahwa hal-hal yang lebih rinci terkait dengan misalnya aktor-aktor komunikasi politik, pesan politik, serta opini publik akan diperdalam pada modul-modul berikutnya.

## **B. KOMUNIKASI POLITIK: BEBERAPA DEFINISI**

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang ada di dalam suatu sistem politik (Almond, Powell Jr., Dalton, dan Strom. 2007). Dengan pengertian ini, komunikasi politik dapat terjadi pada suatu negara, baik yang menganut sistem politik otoritarian, monarki, komunis, atau demokrasi. Almond (2008) selanjutnya menyatakan bahwa fungsi yang lain adalah sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan peraturan, penerapan peraturan, dan adjudikasi peraturan.



Gambar 1.13  
Komunikasi Politik dalam Sistem Politik

Tentunya Anda masih bisa mengingat bahwa sistem politik adalah bagian dari sistem sosial yang dipahami sebagai usaha yang ditempuh untuk mewujudkan kebaikan bersama, kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, dan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sistem politik juga dipahami sebagai suatu pola hubungan manusia yang bersifat konstan dengan melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan di dalamnya (Kollman, 2011).

Sejumlah definisi tentang komunikasi politik kemudian dikemukakan oleh sejumlah ahli, peneliti, dan penulis. Seperti telah disebutkan sebelumnya, definisi-definisi komunikasi politik itu dibangun dari pemahaman mereka yang bisa jadi berfokus pada arah komunikasi ke bawah, horizontal, atau ke atas, serta arah komunikasi lainnya. Hal yang perlu Anda ketahui adalah memahami inti dari sejumlah definisi komunikasi politik dan mencoba menganalisis atau mendiskusikan latar belakang, serta kecenderungan munculnya definisi yang demikian.

Stockman (2006), misalnya menyebut komunikasi politik sebagai “semua bentuk komunikasi baik yang digunakan partai politik, politisi, pemerintah, menteri atau kabinet, ..., yang pada dasarnya merupakan komunikasi di sekitar politik”. Secara jelas, pengertian komunikasi politik yang diberikan Stockman

ini terjadi pada tingkat elit, lebih melihat lingkungan tempat komunikasi politik ini terjadi, dan tidak memberi tekanan pada dampak yang terjadi dalam kehidupan politik akibat adanya komunikasi itu. Pengertian seperti ini, kemungkinan besar terbentuk karena proyek penelitian Stockman terkait dengan masalah pengaruh *spin doctors* pada komunikasi politik.

Definisi yang sedikit berbeda disampaikan Perloff (2003) yang menganggap komunikasi politik sebagai “suatu proses saat pemimpin negara, media, dan warga negara bertukar dan merundingkan pesan-pesan yang terkait dengan kebijakan publik”. Pihak-pihak yang tercakup dalam komunikasi politik, menurut Perloff, tidak lagi semata-mata pada para elit, namun juga media massa serta warga masyarakat. Ini memberi indikasi bahwa komunikasi politik pada dasarnya terjadi di semua wilayah dan kegiatan yang ada pada suatu negara. Arah komunikasi politik bisa jadi ke bawah, ke atas, horizontal, diagonal, atau yang lain, termasuk percampuran arah. Tentu saja, komunikasi politik banyak arah ini lebih banyak terjadi di negara-negara dengan sistem politik yang dilandasi kehidupan demokrasi yang baik. Sebaliknya, komunikasi politik yang demikian hanya sedikit didapati, namun sebagian mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi, atau bahkan sama sekali tidak didapati di negara-negara dengan sistem politik otoritarian.

Definisi komunikasi politik yang bersangkutan paut dengan dampak kehidupan politik dapat dilihat dari definisi berikut ini (Fagen, 1966 dan Nimmo, 1978). Fagen menyatakan komunikasi politik sebagai “kegiatan komunikasi yang berkonsekuensi politik, baik aktual maupun potensial, yang mengatur perilaku manusia dalam keadaan konflik”. Beranjak dari situasi konflik, hubungan antarmanusia diyakini akan berlanjut dengan pencarian solusi di antara mereka yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi. Tercakup di dalam kegiatan komunikasi ini tentunya adalah komunikator dan komunikan, pesan (yang bisa bersifat persuasif), media, dan dampak. Para pelaku komunikasi bisa siapa saja dan dengan arah komunikasi yang bervariasi. Dampak yang terjadi tentunya berasal dari keputusan bersama atas penyelesaian konflik yang terjadi.

Definisi lain menyebutkan komunikasi politik sebagai berbagai bentuk pertukaran simbol atau pesan yang mampu menajamkan atau memiliki dampak pada sistem politik (Meadow, 1980). Definisi ini tentunya terkait dengan pernyataan Almond tentang komunikasi politik dan sistem politik, serta sejumlah pernyataan lain yang memberi penekanan pada dampak kehidupan politik akibat adanya kegiatan komunikasi politik yang dilakukan. Senada

dengan hal ini, Budiardjo (2003) menempatkan komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yaitu dengan menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik. Dampak pada kehidupan politik dari definisi Budiardjo ini terletak pada dibuatnya suatu kebijakan publik dan pada gilirannya diterapkan.

Riaz (2010) dalam menggambarkan kaitan komunikasi politik dengan media baru, mengutip pendapat Robert E. Denton dan Gary C. Woodwar yang menggambarkan komunikasi politik sebagai bentuk penekanan dari komunikator yang berusaha memengaruhi suatu lingkungan politik. Faktor penting yang membuat komunikasi ini menjadi komunikasi politik bukanlah sumber pesan, namun isi dan tujuannya. Dalam bahasa ringkas Brian McNair (2011), komunikasi politik merupakan kegiatan-kegiatan komunikasi yang memang bertujuan politik. Riaz kemudian meyakini bahwa tentu saja kegiatan komunikasi tidak lagi sekadar berupa pernyataan lisan atau tertulis, namun juga segala aspek yang terkait dengan identitas politik, termasuk pakaian, rias wajah, gaya rambut, dan desain logo.

Tentunya banyak definisi lain tentang komunikasi politik yang telah dimunculkan. Anda dapat mencari, mengeksplorasi, serta memahami definisi-definisi komunikasi politik yang lainnya itu. Silakan pergi ke toko buku, ke perpustakaan, atau menjelajah berbagai situs internet yang menyajikan definisi komunikasi politik. Ingat bahwa setiap definisi komunikasi politik yang dimunculkan oleh para ahli, peneliti, dan penulis biasanya selalu terkait dengan keperluan atau bahkan hasil dari penelitian yang mereka lakukan. Konsekuensi logisnya, sejumlah definisi komunikasi politik dapat muncul secara berbeda-beda.

Silakan Anda memahami materi yang ada pada Kegiatan Belajar 2 tentang pengertian komunikasi politik ini dengan cermat. Anda bisa mengembangkan cara belajar Anda dengan mencermati fenomena-fenomena komunikasi yang terjadi di sekitar atau dalam kehidupan Anda sehari-hari, yang kemudian dapat Anda perkirakan sebagai komunikasi politik. Untuk melakukan pemahaman dengan baik, ada baiknya Anda juga mencoba menjawab beberapa soal latihan yang telah disusun. Ingat, semakin sering Anda membaca yang kemudian dilanjutkan dengan mencermati fenomena di sekitar Anda, akan lebih mudah memahami pengertian komunikasi politik.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan tiga arah dominan dalam komunikasi politik! Berikan contoh pada masing-masing arah itu!
- 2) Bagaimana kaitan antara teori pemisahan kekuasaan Montequieu, pers sebagai pilar keempat demokrasi, dan opini publik dalam menggambarkan terjadinya komunikasi politik?
- 3) Bagaimana Gabriel Almond menjelaskan kaitan antara komunikasi politik dan sistem politik?
- 4) Bagaimana definisi komunikasi politik menurut Richard Perloff? Jelaskan persamaan serta perbedaan antara definisi Richard Perloff dan definisi yang diberikan Robert Meadow!
- 5) Bagaimana Saqib Riaz mendefinisikan komunikasi politik dan mengaitkannya dengan media baru?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Pertama, ke bawah (down-wards) yang terjadi saat proses komunikasi dengan dampak politik terjadi antara, misalnya Presiden dan rakyat yang dikunjunginya, atau antara pemilik perusahaan dan para pekerja. Kedua, komunikasi politik horizontal yang dapat diidentifikasi manakala terjadi proses pertukaran informasi atau transaksi informasi antarpihak yang memiliki kedudukan relatif setara, dan yang kemudian memunculkan tindakan-tindakan atau hasil-hasil yang bersifat politik. Ketiga, komunikasi politik dengan arah ke atas (upwards) yang tertangkap saat suatu proses komunikasi berdampak politik lebih melibatkan penyusunan dan pengiriman pesan dari komunikator di tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi, atau bahkan ke tingkat yang tertinggi
- 2) Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang ada di dalam suatu sistem politik, selain sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan peraturan, penerapan peraturan, dan adjudikasi peraturan. Bila dikaitkan dengan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dilontarkan

Montesquieu, pemikiran tentang pers sebagai pilar keempat demokrasi, dan opini publik digunakan, wujud komunikasi politik yang terjadi akan semakin terlihat arahnya. Artinya, proses komunikasi atau transaksi informasi berlangsung dengan melibatkan legislatif, eksekutif, yudikatif, suara muncul dalam opini publik, dan media massa baik secara keseluruhan atau di antara beberapa yang ada, dan memiliki dampak politik, maka arah komunikasi politik bisa bermacam-macam.

- 3) Menurut Almond, komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang ada di dalam suatu sistem politik. Dengan pengertian ini, komunikasi politik dapat terjadi pada suatu negara, baik yang menganut sistem politik authoritarian, monarki, komunis, atau demokrasi. Selanjutnya, fungsi lain dari komunikasi politik adalah sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan peraturan, penerapan peraturan, dan adjudikasi peraturan.
- 4) Perloff berpendapat komunikasi politik sebagai suatu proses saat pemimpin negara, media, dan warga negara bertukar dan merundingkan pesan-pesan yang terkait dengan kebijakan publik. Pihak-pihak yang tercakup dalam komunikasi politik, menurut Perloff, tidak lagi semata-mata pada para elit, namun juga media massa serta warga masyarakat. Sedangkan Meadow mengartikan komunikasi politik sebagai berbagai bentuk pertukaran simbol atau pesan yang mampu menajamkan atau memiliki dampak pada sistem politik.
- 5) Riaz mengaitkan komunikasi politik dengan media baru, bahwa kegiatan komunikasi tidak lagi sekadar berupa pernyataan lisan atau tertulis, namun juga segala aspek yang terkait dengan identitas politik, termasuk pakaian, rias wajah, gaya rambut, dan desain logo.



## RANGKUMAN

---

Langkah-langkah untuk memahami komunikasi politik dapat dilakukan dengan memadukan elemen-elemen komunikasi dengan bidang ilmu politik, konsep-konsep pokok dalam ilmu politik, serta ruang lingkup ilmu politik. Cara yang lebih sederhana untuk memahami komunikasi politik dapat dilakukan dengan melihat fenomena komunikasi yang berdampak politik. Artinya, bila suatu fenomena komunikasi yang biasanya dicirikan dengan terjadinya transaksi informasi atau penyusunan, pengiriman, dan penerimaan pesan kemudian terlihat memiliki dampak

politik, hal inilah yang kemudian menjadi satu pemahaman tentang komunikasi politik.

Norris menyebutkan tiga arah dominan yang dapat terjadi ketika komunikasi politik terjadi. *Pertama*, ke bawah (*down-wards*) yang terjadi saat proses komunikasi dengan dampak politik terjadi antara, misalnya Presiden dan rakyat yang dikunjunginya, atau antara pemilik perusahaan dan para pekerja. *Kedua*, komunikasi politik horizontal yang dapat diidentifikasi manakala terjadi proses pertukaran informasi atau transaksi informasi antarpihak yang memiliki kedudukan relatif setara, dan yang kemudian memunculkan tindakan-tindakan atau hasil-hasil yang bersifat politik. *Ketiga*, komunikasi politik dengan arah ke atas (*upwards*) yang tertangkap saat suatu proses komunikasi berdampak politik lebih melibatkan penyusunan dan pengiriman pesan dari komunikator di tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi, atau bahkan ke tingkat yang tertinggi. Namun demikian, terdapat kemungkinan lain dari kecenderungan arah komunikasi politik, seperti arah komunikasi politik diagonal, arah komunikasi politik yang melingkar ke atas, arah komunikasi politik yang berbentuk roda, dan arah komunikasi politik yang cenderung membuat bentuk bintang.

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang ada di dalam suatu sistem politik, selain sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan peraturan, penerapan peraturan, dan adjudikasi peraturan. Stockman (2006), misalnya menyebut komunikasi politik sebagai semua bentuk komunikasi baik yang digunakan partai politik, politisi, pemerintah, menteri atau kabinet, ..., yang pada dasarnya merupakan komunikasi di sekitar politik. Perloff (2003) menganggap komunikasi politik sebagai suatu proses saat pemimpin negara, media, dan warga negara bertukar dan merundingkan pesan-pesan yang terkait dengan kebijakan publik". Fagen (1966) menyatakan komunikasi politik sebagai "kegiatan komunikasi yang berkonsekuensi politik, baik aktual maupun potensial, yang mengatur perilaku manusia dalam keadaan konflik".

Definisi lain menyebutkan komunikasi politik sebagai berbagai bentuk pertukaran simbol atau pesan yang mampu menajamkan atau memiliki dampak pada sistem politik (Meadow, 1980). Budiardjo (2003) menempatkan komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yaitu dengan menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat, serta mengaturnya sedemikian rupa untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik. Riaz (2010) dalam menggambarkan kaitan komunikasi politik dengan media baru dengan menegaskan bahwa kegiatan komunikasi tidak lagi sekadar berupa pernyataan lisan atau tertulis, namun

juga segala aspek yang terkait dengan identitas politik, termasuk pakaian, rias wajah, gaya rambut, dan desain logo.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Proses komunikasi atau transaksi informasi pada dasarnya melibatkan hal-hal berikut ini....
  - A. penyampaian dan penerimaan pesan
  - B. penyusunan, penyampaian, dan penerimaan pesan
  - C. penyampaian pesan tanpa penyusunan pesan
  - D. penerimaan pesan
  
- 2) Arah komunikasi politik horizontal dapat terjadi pada kegiatan komunikasi....
  - A. antara suatu komunitas anti pornografi dan pejabat dinas kebudayaan
  - B. antara manajemen perusahaan, serikat pekerja, dan para karyawan
  - C. antar-Kepala Dinas di suatu kabupaten
  - D. antara masyarakat dan walikota
  
- 3) Komunikasi politik sebagai suatu proses saat pemimpin negara, media, dan warga negara bertukar dan merundingkan pesan-pesan yang terkait dengan kebijakan publik, merupakan definisi komunikasi politik yang disampaikan oleh....
  - A. Gabriel Almond
  - B. Robert Meadow
  - C. Richard Perloff
  - D. Saqib Riaz
  
- 4) Pengertian tentang komunikasi politik yang merambah luas tak hanya pada pernyataan lisan atau tertulis, namun juga segala aspek yang terkait dengan identitas politik, termasuk pakaian, rias wajah, gaya rambut, dan desain logo dikemukakan oleh....
  - A. Pippa Norris
  - B. Saqib Riaz
  - C. Charles Perloff
  - D. Richard Fagen

- 5) Persamaan dalam hal definisi komunikasi politik terlihat di antara definisi-definisi yang diberikan oleh:
- A. Charles Perloff dan Benjamin Stockman
  - B. Brian McNair, Charles Perloff, dan Benjamin Stockman
  - C. Benjamin Stockman, Miriam Budiardjo, dan Charles Perloff
  - D. Robert Meadow, Gabriel Almond, dan Miriam Budiardjo

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 3****Landasan Filosofis, Teoritik, dan Empirik  
dalam Komunikasi Politik**

Pengertian dan beberapa definisi komunikasi politik yang telah Anda pelajari melalui Kegiatan Belajar 2 pada modul ini, pada dasarnya merupakan hasil dari sejumlah pemikiran filosofis, serta kajian empirik dan teoritik dari fenomena komunikasi yang terkait dengan kehidupan politik. Harus diakui, pertumbuhan dan perkembangan komunikasi politik berikut kajian tentang hal ini, lebih banyak terjadi di negara-negara penganut paham demokrasi, meskipun beberapa yang lain berusaha menghadirkan pemikiran filosofis serta kajian empirik dan teoritik tentang komunikasi politik yang terjadi di negara-negara komunis atau negara penganut sistem politik lainnya.

Terlepas dari asal kajian dan yang kemudian membentuk pemahaman komunikasi politik seperti sekarang ini, catatan penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan kajian tentang komunikasi politik tidak bisa dilepaskan dari kajian yang berkembang di dalam ilmu politik dan ilmu komunikasi, baik secara sendiri-sendiri ataupun dalam paduan penelitian serta pemikiran tentang politik dan tentang komunikasi. Sebaliknya, saat kajian komunikasi politik kemudian ramai dipelajari dan publisitas hasilnya dilakukan, tak dapat disangkal bahwa ilmu politik dan ilmu komunikasi pun kemudian banyak menggunakan hasil kajian komunikasi politik ini untuk pengembangan keilmuannya.

Pada Kegiatan Belajar 3 ini, Anda akan mempelajari tentang landasan filosofis, serta landasan teoritik dan empirik hingga kemudian melahirkan bidang kajian komunikasi politik. Selain membaca dan memahami materi yang ada pada Kegiatan Belajar 3, akan lebih baik jika Anda memperkaya pengetahuan Anda tentang hal ini, dengan membaca buku-buku lain tentang filsafat ilmu, filsafat politik, filsafat komunikasi, serta mencermati sejumlah hasil penelitian yang terkait dengan penelitian di bidang politik, di bidang komunikasi, serta laporan hasil-hasil penelitian terbaru tentang komunikasi politik.

## A. TINJAUAN FILOSOFIS

Filsafat komunikasi politik pada hakikatnya dapat disebut sebagai suatu renungan dengan mendasarkan pada kebenaran dan keadilan dalam kaitannya dengan komunikasi yang dijalankan manusia, yang terkait relasi kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika relasi kekuasaan ini dipahami sebagai aktualisasi simbol-simbol komunikasi oleh manusia, maka filsafat komunikasi politik pada intinya berbicara tentang aktualisasi simbol-simbol komunikasi yang dilakukan manusia dalam keberadaannya di dunia.

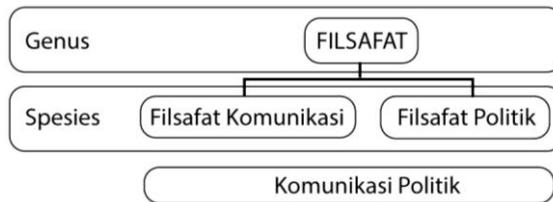
Tentunya Anda akan dengan mudah memahami hal ini, bila mengingat bahwa komunikasi yang dilakukan manusia merupakan proses penyusunan, penyampaian, dan penerimaan pesan. Dalam hal ini, pesan dapat berupa simbol-simbol yang mengandung arti, dan perlu disadari bahwa penciptaan dan pemaknaan simbol merupakan kekuatan pembeda antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Artinya, aktualisasi simbol-simbol komunikasi pada dasarnya sesuatu yang melekat pada kehidupan manusia di dunia yang bila kemudian dikaitkan dengan kekuasaan sebagai salah satu unsur dalam politik, maka pemikiran tentang hal inilah yang tercakup di dalam landasan filosofis komunikasi politik.

Filsafat komunikasi politik yang merupakan pemikiran tentang aktualisasi simbol-simbol komunikasi oleh manusia dalam kaitannya dengan kekuasaan, dapat dilihat dari filsafat klasik ataupun filsafat modern. Anda tentu masih cukup ingat bahwa filsafat klasik berlandaskan pada prinsip kesempurnaan (*completeness*) sebagai akhir dari pemikiran, atau sering dikatakan bahwa prinsip kesempurnaan merupakan tipikal dari filsafat klasik. Sedangkan filsafat modern diwarnai dengan dekonstruksionisme, sebagai suatu metode analisis yang mengkritisi filsafat klasik, dan merupakan suatu sudut pandang budaya umum yang mencerminkan realitas modern. Bentuk dan gaya dari pengalaman pemikiran intelektual mengalami perubahan dalam hal ini. Selain itu postmodernisme muncul dalam filsafat modern sebagai reaksi terhadap rasionalisme absolut dan metafisika alami yang menyadarkan kembali bahwa filsafat pada dasarnya berakar dari literatur dan puisi (Brants dan Voltmer, 2011; Coleman, 2011; dan Mironov, 2006).

Dalam mempelajari tinjauan filosofis komunikasi politik ini, Anda tidak perlu memikirkan lebih jauh tentang filsafat klasik, dekonstruksionime, serta postmodernisme ini. Namun demikian, jika Anda tertarik, Anda dapat mempelajarinya untuk memperkaya wawasan Anda. Hal yang perlu

ditegaskan di sini adalah bahwa komunikasi politik dapat Anda kaji dengan filsafat klasik atau filsafat modern, yang tentunya akan membawa pada sejumlah pemahaman baru tentang filsafat komunikasi politik nantinya.

Secara mendasar, seperti telah disampaikan sebelumnya, harus dipahami bahwa pemikiran tentang komunikasi politik mencakup dua pemikiran, yaitu pemikiran tentang komunikasi dan pemikiran tentang politik. Artinya, pemikiran tentang komunikasi politik menginduk pada filsafat komunikasi dan filsafat politik. Dalam hal ini, filsafat sebagai pemikiran tentang alam semesta dalam mencari kebenaran bersifat sebagai genus atau bersifat umum, sedangkan komunikasi dan politik bersifat sebagai spesies atau bersifat khusus (Montague, 2005). Silakan perhatikan gambar berikut ini:



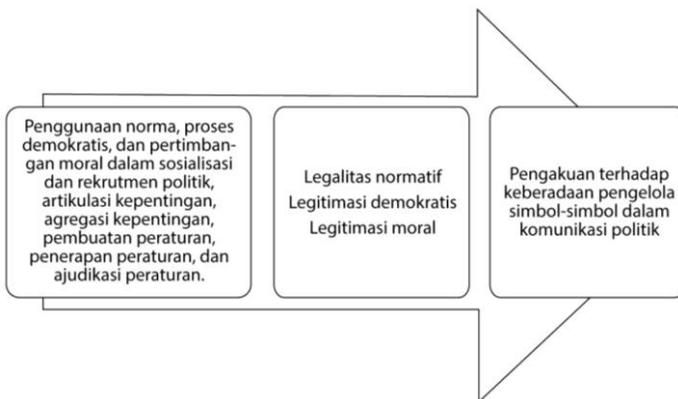
Gambar 1.14  
Tinjauan Filosofi Komunikasi Politik

Sesuai dengan tujuan ketika kegiatan komunikasi dijalankan, manusia akan menggunakan simbol-simbol tertentu dalam mencapai tujuan komunikasinya itu. Meskipun tidak tertutup kemungkinan adanya satu simbol yang digunakan untuk berbagai tujuan komunikasi, pada dasarnya simbol-simbol komunikasi tertentu akan mengarah pada tujuan komunikasi tertentu, baik untuk tujuan pemberian informasi, melakukan persuasi, menyelenggarakan pendidikan, menghadirkan hiburan, ataupun menjaga lingkungan. Segala bentuk tujuan yang ingin dicapai manusia dalam berkomunikasi, pada muaranya akan diarahkan pada penciptaan hubungan antarmanusia yang harmonis.

Seperti Anda ketahui, manusia pada kodratnya adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan manusia yang lain, yang mau tidak mau harus tunduk pada nilai-nilai tertentu. Bila nilai-nilai tertentu ini dipandang sebagai simbol tertentu dalam relasi antara manusia dan lingkungan sosialnya, maka simbol ini perlu diupayakan

terbentuk agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Pembentukan simbol-simbol ini terwadahi melalui upaya penataan kehidupan, baik melalui penataan normatif dengan menerapkan simbol-simbol hukum, maupun melalui penataan efektif yang dimandatkan kepada negara dan diarahkan untuk menjamin terjadinya perubahan perilaku manusia, agar kelakuan mereka sesuai dengan kelakuan yang disepakati di masyarakat (Andrews dan Bontha, 2010; serta Buck, 2002).

Dalam suatu proses komunikasi politik, tindakan individual umumnya dileburkan ke dalam pola-pola tindakan bersama yang disebut dengan tindakan lembaga. Soemarno (2009) menjelaskan, peleburan tindakan spontan individu ke tindakan bersama yang bersifat kelembagaan ini, mewujudkan dalam penggunaan simbol-simbol komunikasi yang utamanya berada pada lembaga kekuasaan. Lebih lanjut Soemarno menjelaskan bahwa pengelola simbol-simbol ini dapat diakui keberadaannya melalui legalitas normatif, legitimasi demokratis, serta legitimasi moral. Legalitas normatif memberi jaminan dengan berdasar norma-norma yang berlaku dalam mengeluarkan produk kebijakan komunikasi yang mengakomodasi kepentingan publik. Legitimasi demokratis memberi jaminan pemerkuat karena didasari pengisian struktur kekuasaan yang dilakukan secara demokratis dengan menggunakan simbol-simbol artikulatif. Legitimasi moral juga menjadi penjamin keberadaan pengelola simbol-simbol kekuasaan dengan dilandasi pertimbangan tentang baik atau buruk, serta kemampuan mempertanggungjawabkannya.



Gambar 1.15  
Landasan Pengakuan Pengelola Simbol-Simbol

Sejauh ini Anda tentu sudah dapat merasakan bahwa komunikasi politik dapat dikatakan selalu berkait dengan transaksi simbol-simbol komunikasi yang berada dalam lingkup politik, digunakan oleh aktor-aktor politik, dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan politik, serta diharapkan dapat memberi dampak tertentu pada kehidupan politik. Dalam transaksi simbol-simbol yang terjadi, berbagai pemikiran tentang komunikasi politik ini muncul dan terus berkembang. Jika memandang komunikasi politik sebagai seni berbicara atau seni dalam menyampaikan pesan (*message*) politik, maka filsafat retorika banyak memengaruhi pemikiran tentang penggunaan simbol-simbol ini (Campbell, 2009). Bila komunikasi politik dipandang sebagai wujud dari pengaruh suatu hubungan interpersonal yang terkait dengan isu politik, termasuk bila kegiatan komunikasi politik ini digunakan untuk melakukan bujukan, maka filsafat psikologi memberi banyak landasan tentang hal ini (Farwell, 2012 dan Bermidez, 2005).

Dua landasan filosofi di atas mewakili sejumlah pemikiran tentang komunikasi politik yang dikaitkan dengan tradisi sosio-psikologis dan tradisi retorika dalam ilmu komunikasi. Anda tentunya masih ingat terhadap keenam tradisi keilmuan komunikasi lainnya. Wawasan dan pengetahuan Anda tentang berbagai filsafat yang berkait dengan keenam tradisi lainnya tentu dapat Anda kembangkan sendiri. Sebagai langkah praktis untuk melakukannya, pikirkan tentang filsafat yang kira-kira terkait dengan tradisi sibernetik, semiotik, sosio-budaya, kritik, fenomenologi, dan etik. Setelah itu cobalah membaca dan mempelajari dasar-dasar dari filsafat yang terkait dengan delapan tradisi keilmuan komunikasi.

Seperti telah disinggung sebelumnya, simbol-simbol yang ada dan digunakan dalam komunikasi, termasuk dalam komunikasi politik, pada hakikatnya merupakan kesepakatan bersama yang menghadirkan pemaknaan tertentu. Kesepakatan bersama (*symbol contract*) dan pemaknaan (*meaningful symbol*) ini dalam kegiatan komunikasi yang dijalankan manusia dapat berwujud bahasa lisan, bahasa tertulis, gambar, isyarat, atau gerak dan raut wajah. Anda dipersilakan membaca kembali modul Pengantar Ilmu Komunikasi, jika ingin menyegarkan ingatan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal.

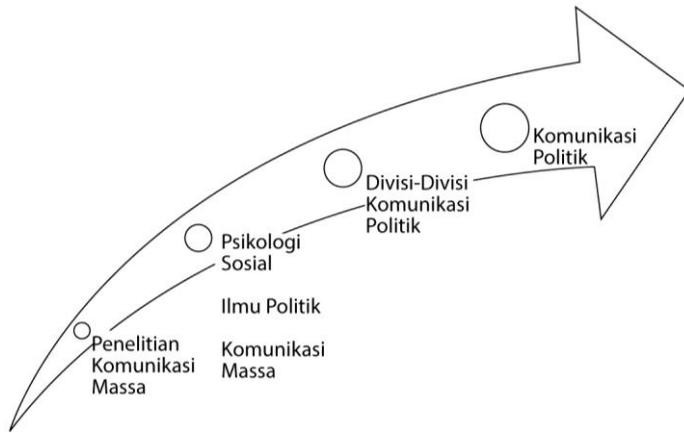
Untuk memperkuat tercapainya tujuan komunikasi politik, penggunaan simbol-simbol ini kerap diperkuat dengan penggunaan alat-alat komunikasi politik yang dapat berupa media tradisional, media cetak, dan media elektronik konvensional, serta untuk masa sekarang media baru. Kehadiran alat-alat

komunikasi politik (*political communication tools*) ini pada hakikatnya adalah untuk memperkaya sudut pandang, serta memperluas wawasan dan pikiran. Dengan kata lain, keberadaan alat-alat komunikasi politik ini sangat membantu manusia dalam menerima keberagaman atau perbedaan, memilah antara kebutuhan dan kepentingan individu, kelompok, golongan yang sempit, kebutuhan dan kepentingan yang lebih luas, serta menghargai dan menghormati berbagai hasil dalam setiap proses politik.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, Anda dapat mencoba untuk melakukan perluasan pemikiran tentang fungsi informasi politik, persuasi politik, dan pendidikan politik dalam kegiatan komunikasi politik dengan filsafat yang di antaranya membahas tentang keberadaan individu, kebebasan, politik, etika, dan komunikasi. Sebagai contoh, mengapa pemikiran tentang kebebasan memiliki pengaruh besar dalam sistem politik yang demokratis dan kurang mendapat tempat di sistem politik otoriter? Tentunya, pengayaan bacaan tentang hal di atas, perlu Anda lakukan agar Anda memiliki pengetahuan yang utuh tentang landasan filosofi komunikasi politik.

## **B. TEORITIK DAN EMPIRIK**

Kajian teoritik dan empirik komunikasi politik pada dasarnya dipakai untuk melihat keberadaan komunikasi politik dalam ilmu sosial, serta berbagai kajian ilmiah yang berpengaruh pada perkembangan komunikasi politik. Tentu saja keberadaan dan kajian ilmiah tentang komunikasi politik ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah komunikasi politik. Satu hal yang harus dicatat adalah bahwa sejarah awal komunikasi politik sangat terkait dengan berbagai penelitian komunikasi massa melalui penerapan teori dan metodologi komunikasinya, yang kemudian dipertajam oleh utamanya psikologi sosial, ilmu politik, dan penelitian-penelitian komunikasi massa berikutnya. (Chaffee dan Hochheimer, 1985). Baru pada sekitar tahun 1970-an, komunikasi politik lebih memperoleh pengakuan setelah dibentuknya berbagai divisi komunikasi politik, di antaranya oleh International Communication Association (ICA) dan American Political Science Association (APSA). Artinya, harus diakui bahwa kisah sejarah komunikasi politik, mau tidak mau dikaitkan dengan perkembangan keilmuan yang berlangsung di Amerika Serikat (Ryfe, 2001).



Gambar 1.16  
Sejarah Perkembangan Komunikasi Politik

Pengaruh psikologi sosial terhadap perkembangan komunikasi politik tentu tidak terlepas dari para peneliti yang berkiprah pada tradisi sosio-psikologi dalam keilmuan komunikasi. Lazarsfeld, Lewin, Hovland, dan Lasswell yang namanya dibesarkan dalam tradisi ini, menyumbangkan banyak perspektif dalam masa-masa awal studi komunikasi politik. Dari para peneliti yang mengikuti tradisi inilah kemudian lahir sejumlah penelitian yang mengkaji masalah perilaku, pendapat, dan keyakinan hingga kemudian melahirkan banyak analisis tentang propaganda politik, persuasi, dan opini publik (silakan menyegarkan ingatan Anda tentang hal ini dengan membaca kembali modul Pengantar Ilmu Komunikasi). Metode survei dan eksperimen, dalam berbagai penelitian pada waktu itu, banyak digunakan mereka yang masuk dalam tradisi sosio-psikologi ini (Holbert, 2013; Hoffman, 2013; Hansen, 2013; dan Ryfe, 2001).

Sejalan dengan keyakinan para peneliti politik penganut behaviorisme, utamanya setelah Perang Dunia II, tentang pengujian teori politik yang banyak didasarkan pada fakta dan data yang diteliti dan dikuantifikasi, ilmu politik kemudian memberi banyak pengaruh pada perkembangan komunikasi politik. Dalam kaitannya dengan hal ini, penelitian-penelitian ilmu politik banyak menyentuh masalah kompetisi kelompok, interaksi antarkelompok kepentingan, proses dan lembaga pemerintahan, kampanye pemilihan, retorika politik, budaya politik, dan sosiologi politik. Pengaruh ilmu politik dalam

komunikasi politik terus berlangsung hingga sekarang, saat media baru masuk dalam keseharian masyarakat dan dalam kehidupan politik (Perloff, 2013; Holbert, 2013; dan Ryfe, 2001).

Penelitian komunikasi massa yang bersentuhan dengan komunikasi politik, terlihat saat sejumlah penelitian mencoba melihat efek atau pengaruh media massa dengan mengkaji peran media massa terhadap politik. Kajian komunikasi massa dalam hal ini, seperti halnya sejumlah penelitian dalam ilmu politik, berkepentingan dengan besar pengaruh media massa dan perubahan sikap, kepercayaan, dan opini yang terjadi. Teori komunikasi *two-step flow*, *agenda setting*, *framing*, *priming*, dan efek-efek media lainnya, menjadi penciri sumbangan penelitian komunikasi massa terhadap perkembangan komunikasi politik (Lippmann, 2013; Sparks, 2012; Bryant dan Cummins, 2006; Wanta dan Ghanem, 2006; serta Ryfe, 2001).

Gambaran sejarah perkembangan awal komunikasi politik di atas memberi landasan tentang kajian teoritik komunikasi politik. Tiga kaidah ilmu yang harus menggambarkan asal keberadaan ilmu, menjelaskan manfaat ilmu, dan memberi nilai bagi kehidupan, menunjukkan bahwa komunikasi politik merupakan ilmu yang tidak bebas nilai (penerapannya selalu terkait dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat), ilmu jiwa dan ilmu budaya, serta ilmu yang berada pada wilayah *das sollen* (seharusnya). Dengan berlandaskan kajian teoritik seperti inilah, kemudian muncul berbagai pengertian atau definisi tentang komunikasi politik (silakan diingat atau dilihat kembali materi yang ada pada Kegiatan Belajar 2 sebelumnya).



Gambar 1.17  
Kajian Teoritik Komunikasi Politik

Namun demikian, secara empirik dapat dikatakan bahwa komunikasi politik merupakan ilmu terapan yang berada dalam wilayah kenyataan (*das sein*). Dalam pengertian ini, komunikasi politik dibangun dari sejumlah studi ilmiah yang terkait dengan transaksi informasi atau proses komunikasi yang melibatkan aktor-aktor politik, pesan-pesan politik, tujuan-tujuan politik, dan dampak politik. Kajian-kajian ilmiah ini dengan sendirinya menempatkan pemahaman politik sebagai sesuatu yang universal, objektif, netral, disusun secara sistematis, dan teruji berdasar data dan fakta yang ada. Sejumlah kajian yang bersentuhan dengan komunikasi politik, baik karena dipengaruhi oleh studi psikologi sosial, ilmu politik, dan komunikasi massa pada masa-masa awal perkembangannya, serta dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi pada masa sekarang, menunjukkan sifat empirik komunikasi politik. Kajian ini berlangsung di berbagai belahan dunia dan negara-negara, baik yang menerapkan sistem politik totaliter atau otoritarian, sistem liberal, sistem tanggung jawab sosial, ataupun sistem komunis.

Kajian-kajian empirik relatif baru tentang komunikasi politik, baik yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, banyak dibahas dalam sejumlah karya ilmiah. Adrienne Russel (2014), misalnya menyajikan karyanya saat berlangsung Konferensi Komunikasi Politik Kualitatif di Seattle, tentang realitas-realitas yang ada dalam dunia media dan dunia politik. Menggunakan pendekatan kualitatif pula Ivie (2013) mendiskusikan asal-muasal mitos dalam retorika kepresidenan. Begitu pula dengan Jarvis (2013) yang mencermati penggunaan kelompok-kelompok untuk mendiskusikan secara terarah dalam penelitian komunikasi politik. Ivie dan Jarwis, dalam hal ini menggunakan metode analisis wacana untuk menyoroti retorika kepresidenan dan penggunaan kelompok-kelompok terarah ini.

Melalui pendekatan kuantitatif, Kenski (2013) menggunakan metode survei untuk menunjukkan rancangan dan penggunaan “*the rolling cross-section*” dalam penelitian komunikasi politik. Grabe (2013) dan Benoit (2013) menggunakan metode analisis isi dalam memperkaya kajian tentang komunikasi politik. Grabe menyajikan hal tentang upaya memahami proses *frame* terhadap berita-berita yang terkait dengan isu pemilihan, sementara Benoit mendiskusikan secara mendalam tentang penggunaan metode analisis isi dalam komunikasi politik. Dengan metode analisis jaringan, Black (2013) menganalisis dan mengukur musyawarah kelompok. Sedangkan Hansel (2013) mendiskusikan tentang penggunaan rancangan eksperimen banyak tahap dalam penelitian komunikasi politik.

Selain sajian tentang penggunaan metode analisis wacana, analisis isi, analisis jaringan, eksperimen, dan survei dalam studi komunikasi politik, kajian empirik komunikasi politik juga dilakukan oleh Allen (2013) yang melihat implikasi dan konsekuensi penggunaan meta analisis untuk komunikasi politik. Sedangkan persoalan-persoalan metodologis dalam melihat komunikasi politik di sejumlah negara dan penerapan teori agenda setting secara internasional, di antaranya diungkapkan oleh McCombs dan Blood (2013) serta Holtz-Bacha (2013).



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pemahaman Anda tentang komunikasi politik dari sudut pandang filsafat!
- 2) Apa yang membedakan antara filsafat klasik dan filsafat modern? Jelaskan relasi antara filsafat dan komunikasi politik!
- 3) Kaidah apa yang mendasari pengakuan keberadaan pengelola simbol-simbol komunikasi politik!
- 4) Jelaskan kaitan antara delapan tradisi keilmuan komunikasi dan filsafat yang terkait dengannya!
- 5) Jelaskan kaitan antara perkembangan awal penelitian komunikasi politik dan psikologi sosial!
- 6) Berikan penjelasan Anda tentang kajian empirik komunikasi politik.

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Filsafat komunikasi politik pada hakikatnya merupakan suatu renungan dengan mendasarkan pada kebenaran dan keadilan dalam kaitannya dengan komunikasi yang dijalankan manusia, yang terkait relasi kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika relasi kekuasaan ini dipahami sebagai aktualisasi simbol-simbol komunikasi oleh manusia, maka filsafat komunikasi politik pada intinya berbicara tentang aktualisasi simbol-simbol komunikasi yang dilakukan manusia dalam keberadaannya di dunia.

- 2) Filsafat komunikasi politik dapat dilihat dari filsafat klasik ataupun filsafat modern. Pemikiran tentang komunikasi politik menginduk pada filsafat komunikasi dan filsafat politik. Filsafat sebagai pemikiran tentang alam semesta dalam mencari kebenaran bersifat sebagai genus atau bersifat umum, sedangkan komunikasi dan politik bersifat sebagai spesies atau bersifat khusus. Filsafat klasik berlandaskan pada prinsip kesempurnaan (completeness) sebagai akhir dari pemikiran, atau sering dikatakan bahwa prinsip kesempurnaan merupakan tipikal dari filsafat klasik. Sedangkan filsafat modern diwarnai dengan dekonstruksionisme, sebagai suatu metode analisis yang mengkritisi filsafat klasik, dan merupakan suatu sudut pandang budaya umum yang mencerminkan realitas modern
- 3) Tiga kaidah ilmu yang harus menggambarkan asal keberadaan ilmu, menjelaskan manfaat ilmu, dan memberi nilai bagi kehidupan, menunjukkan bahwa komunikasi politik merupakan ilmu yang tidak bebas nilai (penerapannya selalu terkait dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat), ilmu jiwa dan ilmu budaya, serta ilmu yang berada pada wilayah *das sollen* (seharusnya). Manusia pada kodratnya adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan manusia yang lain yang mau tidak mau harus tunduk pada nilai-nilai tertentu. Bila nilai-nilai tertentu ini dipandang sebagai simbol tertentu dalam relasi antara manusia dan lingkungan sosialnya, maka simbol ini perlu diupayakan terbentuk agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Pembentukan simbol-simbol ini terwadahi melalui upaya penataan kehidupan, baik melalui penataan normatif maupun melalui penataan efektif. Simbol-simbol yang ada dan digunakan dalam komunikasi, termasuk dalam komunikasi politik, pada hakikatnya merupakan kesepakatan bersama yang menghadirkan pemaknaan tertentu.
- 4) Dalam menjawab kaitan antara delapan tradisi keilmuan komunikasi dan filsafat, Anda dapat membaca kembali materi kegiatan belajar 1 ini.
- 5) Pengaruh psikologi sosial terhadap perkembangan komunikasi politik tentu tidak terlepas dari para peneliti yang berkiprah pada tradisi sosio-psikologi dalam keilmuan komunikasi. Pelajari kembali materi kegiatan belajar 1 untuk menguraikan perkembangan awal penelitian komunikasi politik dengan psikologi sosial.
- 6) Secara empirik dapat dikatakan bahwa komunikasi politik merupakan ilmu terapan yang berada dalam wilayah kenyataan (*das sein*). Dalam

pengertian ini, komunikasi politik dibangun dari sejumlah studi ilmiah yang terkait dengan transaksi informasi atau proses komunikasi yang melibatkan aktor-aktor politik, pesan-pesan politik, tujuan-tujuan politik, dan dampak politik. Kajian-kajian ilmiah ini dengan sendirinya menempatkan pemahaman politik sebagai sesuatu yang universal, objektif, netral, disusun secara sistematis, dan teruji berdasar data dan fakta yang ada. Sejumlah kajian yang bersentuhan dengan komunikasi politik, baik karena dipengaruhi oleh studi psikologi sosial, ilmu politik, dan komunikasi massa pada masa-masa awal perkembangannya, serta dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi pada masa sekarang, menunjukkan sifat empirik komunikasi politik. Kajian ini berlangsung di berbagai belahan dunia dan negara-negara, baik yang menerapkan sistem politik totaliter atau otoritarian, sistem liberal, sistem tanggung jawab sosial, ataupun sistem komunis



## RANGKUMAN

---

Filsafat komunikasi politik pada hakikatnya merupakan suatu renungan dengan mendasarkan pada kebenaran dan keadilan dalam kaitannya dengan komunikasi yang dijalankan manusia, yang terkait relasi kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika relasi kekuasaan ini dipahami sebagai aktualisasi simbol-simbol komunikasi oleh manusia, maka filsafat komunikasi politik pada intinya berbicara tentang aktualisasi simbol-simbol komunikasi yang dilakukan manusia dalam keberadaannya di dunia. Filsafat komunikasi politik dapat dilihat dari filsafat klasik ataupun filsafat modern. Pemikiran tentang komunikasi politik menginduk pada filsafat komunikasi dan filsafat politik. Filsafat sebagai pemikiran tentang alam semesta dalam mencari kebenaran sebagai genus atau bersifat umum, sedangkan komunikasi dan politik bersifat sebagai spesies atau bersifat khusus.

Manusia pada kodratnya adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan manusia yang lain yang mau tidak mau harus tunduk pada nilai-nilai tertentu. Bila nilai-nilai tertentu ini dipandang sebagai simbol tertentu dalam relasi antara manusia dan lingkungan sosialnya, maka simbol ini perlu diupayakan terbentuk agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Pembentukan simbol-simbol ini terwadahi melalui upaya penataan kehidupan, baik melalui penataan normatif maupun melalui penataan efektif. Simbol-simbol yang ada dan digunakan dalam

komunikasi, termasuk dalam komunikasi politik, pada hakikatnya merupakan kesepakatan bersama yang menghadirkan pemaknaan tertentu.

Penggunaan simbol-simbol komunikasi politik, kerap diperkuat dengan penggunaan alat-alat komunikasi politik yang dapat berupa media tradisional, media cetak dan media elektronik konvensional, serta untuk masa sekarang media baru. Kehadiran alat-alat komunikasi politik ini pada hakikatnya adalah untuk memperkaya sudut pandang serta memperluas wawasan dan pikiran yang sangat membantu manusia dalam menerima keberagaman atau perbedaan, memilah antara kebutuhan dan kepentingan individu, kelompok, golongan yang sempit, kebutuhan dan kepentingan yang lebih luas, serta menghargai dan menghormati berbagai hasil dalam setiap proses politik.

Kajian teoritik dan empirik komunikasi politik pada dasarnya dipakai untuk melihat keberadaan komunikasi politik dalam ilmu sosial, serta berbagai kajian ilmiah yang berpengaruh pada perkembangan komunikasi politik. Sejarah awal komunikasi politik sangat terkait dengan berbagai penelitian komunikasi massa, melalui penerapan teori dan metodologi komunikasinya, yang kemudian dipertajam oleh utamanya psikologi sosial, ilmu politik, penelitian-penelitian komunikasi massa berikutnya, serta pembentukan berbagai divisi komunikasi politik di sejumlah asosiasi.

Kajian teoritik komunikasi politik menunjukkan bahwa komunikasi politik merupakan ilmu yang tidak bebas nilai, ilmu jiwa dan ilmu budaya, serta ilmu yang berada pada wilayah *das sollen* (seharusnya). Dengan berlandaskan kajian teoritik ini, kemudian muncul berbagai pengertian atau definisi tentang komunikasi politik. Secara empirik dapat dikatakan bahwa komunikasi politik merupakan ilmu terapan yang berada dalam wilayah kenyataan (*das sein*). Dalam pengertian ini, komunikasi politik dibangun dari sejumlah studi ilmiah yang terkait dengan transaksi informasi atau proses komunikasi yang melibatkan aktor-aktor politik, pesan-pesan politik, tujuan-tujuan politik, dan dampak politik. Kajian-kajian ilmiah ini dengan sendirinya menempatkan pemahaman politik sebagai sesuatu yang universal, objektif, netral, disusun secara sistematis, dan teruji berdasar data dan fakta yang ada.

**TES FORMATIF 3**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Manakah di antara hal-hal berikut ini yang benar?
  - A. Filsafat komunikasi politik bersifat spesies dan filsafat bersifat genus.
  - B. Filsafat politik dan filsafat komunikasi bersifat genus dan filsafat bersifat spesies.
  - C. Filsafat bersifat spesies.
  - D. Filsafat politik dan filsafat komunikasi bersifat spesies dan filsafat bersifat genus.
  
- 2) Manakah di antara hal-hal berikut ini yang benar?
  - A. Kesempurnaan merupakan tipikal filsafat klasik.
  - B. Reaksi atas rasionalisme absolut, muncul dalam filsafat klasik, reaksi atas metafisika alami muncul dalam filsafat modern.
  - C. Tindakan spontan individu merupakan ciri utama dalam komunikasi politik.
  - D. Hanya legitimasi demokratis yang dapat menjadi dasar penerimaan terhadap keberadaan pengelola simbol-simbol komunikasi politik.
  
- 3) Manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut ini yang benar?
  - A. Alat-alat komunikasi politik pada hakikatnya dapat memperkaya sudut pandang serta memperluas wawasan dan pikiran.
  - B. Kesepakatan bersama dan pemaknaannya hanya muncul dalam bahasa tertulis.
  - C. Alat komunikasi politik yang utama adalah media elektronik.
  - D. Kesepakatan bersama dan pemaknaannya hanya dapat diperoleh, bila ada alat-alat komunikasi politik.
  
- 4) Sejarah awal kajian komunikasi politik utamanya dipengaruhi tiga hal, yaitu....
  - A. ilmu filsafat, ilmu politik, dan ilmu komunikasi
  - B. penelitian komunikasi massa, ilmu filsafat, dan ilmu politik
  - C. ilmu politik, penelitian komunikasi massa, dan psikologi sosial
  - D. Perang Dunia II, penelitian komunikasi massa, dan pembentukan divisi-divisi komunikasi politik

- 5) Pengaruh psikologi sosial dalam kajian empirik komunikasi politik dicirikan oleh....
- A. tradisi sosio-kultural dan tradisi retorika keilmuan komunikasi
  - B. pendekatan kualitatif dalam penelitian-penelitiannya
  - C. metode eksperimen dalam penelitian tentang opini publik
  - D. berbagai perspektif komunikasi politik yang disumbangkan empat tokoh utama ilmu komunikasi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Test Formatif 1*

- 1) C
- 2) B
- 3) C
- 4) A
- 5) D

### *Test Formatif 2*

- 1) B
- 2) C
- 3) A
- 4) C
- 5) B

### *Test Formatif 3*

- 1) D
- 2) A
- 3) A
- 4) C
- 5) D

## Daftar Pustaka

- Adamovic, L. 1950. *Contemporary Political Science: A Survey of Methods*. Paris: UNESCO.
- Allen, Mike. 2013. "The Implications and Consequences of Using Meta-Analysis for Political Communication". Dalam Bucy, Erik P. dan R. Lance Holbert (eds.). *Sourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques*. London: Routledge. Hal. 114 – 125.
- Almond, Gabriel A. 2008. *Comparative Politics Today: A World View*. London: Pearson Longman.
- Almond, Gabriel A., G. Bingham J. Powell Jr., Russell J. Dalton, dan Kaare Strom. 2007. *Comparative Politics Today: A World View*. Harlow: Longman.
- Altman, Irwin dan Dalmás Taylor. 2003. "Social Penetration Theory". Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. hal. 132-141.
- Andrews, D.A. dan James Bonta. 2010. *The Psychology of Criminal Conduct*. Cincinnati, OH: Anderson.
- Aristotle. 2003. "The Rhetoric". dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. hal. 303-311.
- Barthes, Roland. 2003. "Semiotics". dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. hal. 355-365.
- Benoit, William L. 2013. "Content Analysis in Political Communication". Dalam Bucy, Erik P. dan R. Lance Holbert (eds.). *Sourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques*. London: Routledge. Hal. 268-280.
- Berger, Charles. 2003. "Uncertainty Reduction Theory". Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. hal. 142-156.

- Bermudez, Jose Luis. 2005. *Philosophy of Psychology: A Contemporary Introduction*. London: Routledge.
- Black, Laura W. 2013. "Methods for Analyzing and Measuring Group Deliberation". Dalam Bucy, Erik P. dan R. Lance Holbert (eds.). *Sourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques*. London: Routledge. Hal. 323 – 345.
- Brants, Kees dan Katrin Voltmer. 2011. "Introduction: Mediatization and Decentralization of Political Communication". Dalam Kees Brants dan Katrin Voltmer (eds.). *Political Communication in Postmodern Democracy: Challenging the Primacy of Politics*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Hal 1-18.
- Bryant, Jennings dan R. Glenn Cummins. 2006. "Traditions of Mass Media Theory and Research". Dalam Raymond W. Preiss, Barbara Mae Gayle, Nancy Burrell, Mike Allen, dan Jennings Bryant (eds.). *Mass Media Effects Research: Advances Through Meta-Analysis*. Oxford, OX: Routledge Communication Series. Hal. 1 – 14.
- Buck, Susan. 2002. "Science as a Substitute for Moral Principle". Dalam John Martin Gillroy dan Joe Bowersox (eds.). *The Moral Austerity of Environmental Decision Making: Sustainability, Democracy, and Normative Argument in Policy and Law*. Durham, NC: Duke University Press Books. Hal. 25-29.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burgoon, Judee. 2003. "Expectancy Violations Theory". Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. Hal. 82-94.
- Burgoon, Judee dan David Buller. 2003. "Interpersonal Deception Theory." Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. hal. 95-111.
- Burke, Kenneth. 2003. "Dramatism". Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. Hal. 313-322.
- Campbell, George. 2009. *The Philosophy of Rhetoric*. Book Jungle.

- Carey, James. 1989. *Communication as Culture*. Boston: Unwin Hyman.
- Chaffee, S. dan J.L. Hochheimer. 1985. "The Beginnings of Political Communication Research in the United States: Origins of the "Limited Effects" Model. Dalam E. M. Rogers dan F. Balle (Eds.). *The Media Revolution in America and Western Europe*. Norwood, NJ: Ablex. Hal. 60-95.
- Clawson, Rosalee A. dan Zoe M. Oxley. 2012. *Public Opinion: Democratic Ideals, Democratic Practice*. Thousand Oaks, CA: CQ Press.
- Cohen, I. Bernard. 1983. *Revolution in Science*. Cambridge: Belknap Press.
- Coleman, Stephen. 2011. "Representation and Mediated Politics: Representing Representation in an Age of Irony". Dalam Kees Brants dan Katrin Voltmer (eds.). *Political Communication in Postmodern Democracy: Challenging the Primacy of Politics*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Hal. 39 – 58.
- Cooper, John M. dan D.S. Hutchinson. 1997. *Plato: Complete Works*. Cambridge, MA: Hackett Publishing Co.
- Dahl, Robert A. 2000. *On Democracy*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Dahl, Robert A. dan Bruce Stinebrickner. 2002. *Modern Political Analysis*. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Dearing, James W. dan Everett M. Rogers. 1988. "Agenda-Setting Research: Where has It been, Where is It Going?". *Communication Yearbook* 11. Hal. 555–594.
- DeFleur, M.L. dan S. Ball-Rokeach. 1989. *Theories of Mass Communication*. New York: Longman.
- Deutsch, Karl W. 1980. *Politics and Government: How People Decide Their Fate*. Boston, MA: Houghton Mifflin School.
- Dunleavy, Patrick dan Brendan O'Leary. 1998. *Theories of the State: The Politics of Liberal Democracy*. New Amsterdam Books. ISBN-13: 978-0941533850

- D'Amato, Paul. 2006. *The Meaning of Marxism*. Chicago, IL: Haymarket Books.
- Easton, David. 1971. *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. New York, NY: Knopf.
- Ekman, Paul. 1973. *Darwin and Facial Expression: A Century of Research in Review*. New York: Academic Press.
- Epstein, David dan Sharyn O'Halloran. 1999. *Delegating Powers: A Transaction Cost Politics Approach to Policy Making under Separate Powers*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fagen, Richard R. 1966. *Politics and Communication: An Analytic Study*. New York, NY: Little Brown & Company.
- Farwell, James P. 2012. *Persuasion and Power: The Art of Strategic Communication*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Fawcett, Edmund. 2014. *Liberalism: The Life of an Idea*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Festinger, Leon. 2003. "Cognitive Dissonance Theory". Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. Hal. 209-220.
- Fisher, Walter. 2003. "Narrative Paradigm". Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. Hal. 323-332.
- Fiske, John. 1990. *Introduction to Communication Studies*. London: Routledge.
- Fiske, John. 1987. *Television Culture*. London: Routledge.
- Franklin, Julian H. 2009. *Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Geertz, Clifford dan Michael Pacanowsky. 2003. "Cultural Approach to Organization". Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. Hal. 272-282.

- Gerbner, G. 1956. "Toward a General Model of Communication". Dalam *Audio Visual Communication Review*. (IV) No. 3. Hal. 171-199.
- Gerbner, George. 2003. "Cultivation Theory". Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. Hal. 380-389.
- Grabe, Maria Elizabeth. 2013. "Image Bite Analysis of Political Visuals: Understanding the Visual Framing Process in Election News". Dalam Bucy, Erik P. dan R. Lance Holbert (eds.). *Sourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques*. London: Routledge. Hal. 209 – 237.
- Griffin, Em. 2011. *A First Look At Communication Theory*. London; McGraw-Hill.
- Gupta, R.K. 2012. *Mass Media: Democracy's Fourth Estate*. Pearl Books. ISBN-13: 978-9381575246.
- Habermas, Jurgen. 2001. "The Public Sphere: An Encyclopedia Article". Dalam Meenakshi Gigi Durham dan Douglas M. Kellner (eds.). *Media and Cultural Studies*. Oxford: Blackwell Publishers. Hal. 102-107.
- Hall, Stuart. 2003. "Cultural Studies". dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. Hal. 366-379.
- Hamlett, Patrick W. 1991. *Understanding Technological Politics: A Decision-Making Approach*. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Hansen, Glenn J. 2013. "Multi-Stage Experimental Designs in Political Communication Research". Dalam Bucy, Erik P. dan R. Lance Holbert (eds.). *Sourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques*. London: Routledge. Hal. 194 – 205.
- Heineman, Robert. 1995. *Political Science*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Heywood, Andrew. 2013. *Politics*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Hodge, Robert dan Gunther Kress. 1988. *Social Semiotics*. Cambridge: Polity Press.

- Hoffman, Lindsay H. 2013. "Political Communication Survey Research: Challenges, Trends, and Opportunities". Dalam Bucy, Erik P. dan R. Lance Holbert (eds.). *Sourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques*. London: Routledge. Hal. 55 – 78.
- Holbert, R. Lance. 2013. "Advancing Methods and Measurement: Supporting Theories and Keeping Pace with the Modern Political Communication Environment". Dalam Bucy, Erik P. dan R. Lance Holbert (eds.). *Sourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques*. London: Routledge. Hal. 3 – 18.
- Holtz-Bacha, Christina. 2013. "Political Communication across the World: Methodological Issues Involved in International Comparisons". Dalam Bucy, Erik P. dan R. Lance Holbert (eds.). *Sourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques*. London: Routledge. Hal. 395 – 415.
- Honiq, Bonnie. 1993. *Political Theory and the Displacement of Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Ivie, Robert I. 2013. "Genealogy of Myth in Presidential Rhetoric". Dalam Bucy, Erik P. dan R. Lance Holbert (eds.). *Sourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques*. London: Routledge. Hal. 300 – 320.
- Jarvis, Sharon E. 2013. "The Uses of Focus Groups in Political Communication Research". Dalam Bucy, Erik P. dan R. Lance Holbert (eds.). *Sourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques*. London: Routledge. Hal. 283 – 299
- Kay, Paul dan Willet Kempton. 1984. "What is the Sapir-Whorf Hypothesis?" dalam *American Anthropologist*. (86). Hal. 65-79.
- Kenski, Kate. 2013. "The Rolling Cross-Section: Design and Utility for Political Research". Dalam Bucy, Erik P. dan R. Lance Holbert (eds.). *Sourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques*. London: Routledge. Hal. 34 – 54.
- Kollman, Ken. 2012. *The American Political System*. New York, NY: W. W. Norton & Company.

- Kymlicka, Will. 2001. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Larson, Charles U. 1986. *Persuasion, Reception and Responsibility*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Lasswell, Harold D. 2011. *Politics: Who Gets What, When, How*. Whitefish, MT: Literary Licensing, LLC.
- Lippmann, Walter. 2013. *Public Opinion*. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform. Hal. 1 – 15.
- Macpherson, C.B. 2011. *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*. Oxford: Oxford University Press.
- McCombs, Maxwell dan Donald Shaw. 2003. “Agenda Setting Theory.” Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. Hal. 390-402.
- McCombs, Maxwell E. dan R. Warwick Blood. 2013. “International Applications of Agenda Setting Theory’s Acapulco Typology”. Dalam Bucy, Erik P. dan R. Lance Holbert (eds.). *Sourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques*. London: Routledge. Hal. 383 – 394.
- McCombs, M.E., D.L. Shaw, dan D.L. Weaver. 1997. *Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory*. Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum.
- McLuhan, Marshall. 2003. “Technological Determinism”. Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. Hal. 341-354.
- McLuhan, Marshall dan Quentin Fiore. 1967. *The Medium is the Message*. New York: Random House.
- McNair, Brian. 2011. *Political Communication Bundle: An Introduction to Political Communication*. London: Routledge.
- McQuails, Denis. 2000. *Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.

- McQuails, Denis. 1998. "With the Benefit of Hindsight: Reflection on Uses and Gratifications Research". Dalam Roger Dickinson, Ramaswami Harindranath dan Olga Linne (eds.). *Approaches to Audiences*. London: Arnold. Hal. 151-165.
- Meadow, Robert G. 1980. *Politics as Communication*. New York, NY: Ablex Pub.
- Mironov, Vladimir. 2006. "Modern Communication, Culture & Philosophy". Diunduh tanggal 26 Maret 2014 dan terarsip di:  
[http://philosophynow.org/issues/54/Modern\\_Communication\\_Culture\\_and\\_Philosophy](http://philosophynow.org/issues/54/Modern_Communication_Culture_and_Philosophy).
- Montague, William Pepperell. 2005. *The Ways of Knowing or The Methods of Philosophy*. Whitefish, Montana: Kessinger Publishing, LLC.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Rosda.
- Newcomb, T. 1953. An Approach to the Study of Acts. Dalam *Psychological Review*. No. 60. Hal. 393-400.
- Nidditch, Peter H. 1979. "Foreword". dalam Peter H. Nidditch (ed.). *An Essay Concerning Human Understanding*. Oxford: Oxford University Press.
- Nimmo, Dan. 1978. *Political Communication and Public Opinion in America*. Culver City, CA: Goodyear Pub. Co.
- Norris, Pippa. 2010. *A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Nozick, Robert. 2013. *Anarchy, State, and Utopia*. New York, NY: Basic Books.
- Ozment, Steven. 1981. *The Age of Reform, 1250-1550: An Intellectual and Religious History of Late Medieval and Reformation Europe*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Paxton, Robert O. 2005. *The Anatomy of Fascism*. London: Vintage.
- Perloff, Richard M. 2013. *The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age*. New York, NY: Routledge.

- Rahe, Paul Anthony. 2010. *Montesquieu and the Logic of Liberty: War, Religion, Commerce, Climate, Terrain, Technology, Uneasiness of Mind, the Spirit of Political Vigilance, and the Foundations of the Modern Republic*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Reardon, Kathleen K. dan Everett M. Rogers. 1988. "Interpersonal versus Mass Communication: A False Dichotomy?." *Human Communication Research*.15 (2). Hal. 284-303.
- Riaz, Saqib. 2010. "Effects of New Media Technologies on Political Communication". *Journal of Political Studies*, Vol. 1, Issue 2, Hal. 161-173
- Robson, William A. 1967. *Politics and Government at Home and Abroad*. Crows Nest, NSW: Allen & Unwin.
- Rogers, Everett M. 1994. *A History of Communication Study: A Biographical Approach*. New York: The Free Press.
- Ross, Raymond S. 1965. *Speech Communication: Fundamentals and Practice*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Russell, Adrienne. 2014. "The Many Realities of Media and Politics". Makalah pada *Qualitative Political Communication Research Conference*. 22 Mei 2014. Seattle: International Communication Association.
- Ryan, Alan. 2012. *On Politics: A History of Political Thought: From Herodotus to the Present*. New York, NY: Liveright.
- Ryfe, David Michael. 2001. "History and Political Communication: An Introduction." *Political Communication*, 18. Hal. 407–420.
- Salkever, Stephen G. 2014. *Finding the Mean: Theory and Practice in Aristotelian Political Philosophy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Sargent, Lyman T. 2008. *Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis*. Stamford, CT: Cengage Learning.
- Schramm, Wilbur. 1960. *Mass Communication*. Illinois: University of Illinois Press.

- Severin, Werner J. dan James W. Tankard. 2000. *Communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media*. Boston: Addison Wesley Longman.
- Shannon, C dan W. Weaver. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. Illinois: University of Illinois Press.
- Sherif, Muzafer. 2003. "Social Judgment Theory". Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. Hal. 186-195.
- Sigmund, Paul E. 2005. *The Selected Political Writings of John Locke*. New York, NY: W. W. Norton & Company.
- Skinner, Quentin. 1990. *The Return of Grand Theory in the Human Sciences*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Soemarno, AP. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sowell, Thomas. 1985. *Marxism: Philosophy and Economics*. Fort Mill, SC: Quill.
- Sparks, Glenn G. 2012. *Media Effects Research: A Basic Overview*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Stockman, Benjamin. 2007. *The Influence of Spin Doctors on Political Communications*. Projek. Kortrijk: Hogeschool West-Vlaanderen Departement HIEPSO.
- Tilly, Charles. 2007. *Democracy*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Trenholm, Sarah. 1989. *Persuasion and Social Influence*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Wanta, Wayne dan Salma Ghanem. 2006. "Effects of Agenda Setting". Dalam Raymond W. Preiss, Barbara Mae Gayle, Nancy Burrell, Mike Allen, dan Jennings Bryant (eds.). *Mass Media Effects Research: Advances Through Meta-Analysis*. Oxford, OX: Routledge Communication Series. Hal. 37 – 52.

- Watzlawick, Paul; Janet Helmick Beavin, dan Don D. Jackson. 1967. *Pragmatics of Human Communication: A Study of Interaction Patterns, Pathologies and Paradoxes*. New York: Norton.
- Weick, Karl. 2003. "Information Systems Approach to Organizations". Dalam Em Griffin (ed). *A First Look At Communication Theory*. London: McGraw-Hill. Hal. 261-271.
- Westley, B dan M. MacLean. 1957. "A Conceptual Model for Communication Research". dalam *Journalism Quarterly*. No. 34. Hal. 31-38.
- Wiener, Norbert. 1967. *The Human Use of Human Beings*. New York: Avon.
- Wolff, Jonathan. 1991. *Robert Nozick: Property, Justice, and the Minimal State*. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
- Zacharis, John C. dan Coleman C. Bender. 1976. *Speech Communications: A Rational Approach*. Hoboken, NNJ: John Wiley & Sons Inc.